

**PEMBERDAYAAN DALAM
PERSPEKTIF STAKEHOLDERS**

*Pengungkapan Makna Pemberdayaan Masyarakat
di Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara*

IRWAN GANI

Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbitan

Irwan Gani

PEMBERDAYAAN DALAM PERSPEKTIF STAKEHOLDERS:

Pengungkapan Makna Pembersayaan Masyarakat Wilayah Pesisir
Kabupaten Kutai Kartanegara

Red Carpet Studio.net

Cet I, 2011, 15 cm x 21 cm, iv, 81 halaman

ISBN: 978-6028955-86-7

Hak Cipta 2011 ada pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara
apapun, termasuk dengan menggunakan mesin fotocopy, tanpa
izin sah dari penulis

Penulis : Irwan Gani

Judul : PEMBERDAYAAN DALAM PERSPEKTIF
STAKEHOLDERS: Pengungkapan Makna
Pembersayaan Masyarakat Wilayah Pesisir
Kabupaten Kutai Kartanegara

Editor : -

Desain Grafis : Creative Team

Cetakan I, September 2011

Penerbit:

Red Carpet Studio.net (<http://redcarpetstudio.net>)

Griya Timur Indah A9 No. 8 Jatimulya Bekasi, JAWA BARAT

Telepon & SMS: 0852-108-12347

Email: anangyb@yahoo.com dan panjibudi@yahoo.com

PRAKATA

Kemiskinan di Kalimantan Timur menurut Laporan Bappenas Tahun 2008 sudah termasuk ke dalam kelompok yang bertanda kuning. Artinya, kemiskinan di salah satu provinsi terkaya di Indonesia ini harus ditanggulangi secara lebih serius. Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu kabupaten di Kalimantan Timur yang juga ber “label” kabupaten terkaya, ternyata malah menjadi kabupaten yang terbanyak prosentase penduduk miskinnya. Artinya, masih banyak “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan di kabupaten ini. Pekerjaan rumah tersebut adalah bagaimana membuat program penanggulangan kemiskinan menjadi lebih optimal, yang salah satunya adalah dengan melakukan evaluasi terhadap program-program pemberdayaan yang sudah dilakukan. Di sinilah penulis mengambil peran, sebagai bentuk tanggung jawab moral sebagai warga Kalimantan Timur.

Buku kecil ini adalah hasil penulisan ulang dari disertasi penulis tentang kemiskinan dan pemberdayaan dengan pendekatan *grounded research*. Lazimnya sebuah disertasi, maka hasil penelitian ini dengan segala kekurangan dan kelemahannya, telah mendapat bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Untuk itu, ucapan terimakasih penulis haturkan kepada: Prof. Dr. W.I.M. Poli dan Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si sebagai pembimbing. Ucapan terimakasih juga diucapkan kepada: Dr. Ir. Khadijah Dahlan, M.Si, Prof. Dr. M. Yunus Zain, MA., Prof. Nurul Ilmi Idrus, PhD., Dr. Ir. Rahim Darma, MS., dan Dr. Paulus Uppun, MA, sebagai penguji. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada seluruh keluarga penulis dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis. Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak, dan memberikan warna baru dalam pembahasan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan penelitian yang relatif masih jarang dilakukan di Indonesia.

Samarinda, Agustus 2011
Penulis

DAFTAR ISI

Prakata

Daftar Isi

Bab 1	Sekilas tentang Masalah Pemberdayaan	1
Bab 2	Beberapa Konsep tentang Pemberdayaan	5
Bab 3	Kerangka Konsep Pemberdayaan di Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara	15
Bab 4	“Mengungkap dan Menangkap” Suara Stakeholder Pemberdayaan	21
Bab 5	Sense of Data: Potret Pemberdayaan	35
Bab 6	Suara Stakeholder Pemberdayaan	45
Bab 7	Belajar dari Pengalaman	71
	Daftar Pustaka	77
	Tentang Penulis	82

SEKILAS TENTANG MASALAH PEMBERDAYAAN

Tidak jarang pengalaman justru menempa target group (sasaran pemberdayaan) menjadi kelompok yang lebih tahu tentang pemberdayaan, dibandingkan Change Agent (pelaku pemberdayaan) sendiri

Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara kontradiktif dengan label sebagai kabupaten terkaya di Kalimantan Timur, bahkan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur Tahun 2007 terdapat 56.423 rumah tangga miskin (RTM), yang sebagian besar berada di wilayah pesisir. Angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara ini, mengindikasikan bahwa program-program pembangunan belum optimal tingkat keberhasilannya. Padahal, Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kabupaten yang menyandang predikat sebagai kabupaten terkaya di Indonesia. Terkaya, karena APBD (termasuk APBDP) pertahun rata-rata mencapai 5 Trilyun rupiah. Sementara, prosentase angka kemiskinannya adalah yang tertinggi di Kalimantan Timur.

Sadar dengan fakta ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mencoba menekan angka kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat di Kabupaten terkaya di Indonesia ini, umumnya dilakukan oleh tiga kelompok pelaku (*change agent*), yaitu pemerintah, perusahaan, dan Lembaga Swadaya Manusia (LSM). Masing-masing kelompok memiliki ciri khas program dan pendekatan yang berbeda-beda. Pemerintah melakukan pemberdayaan melalui program Gerbang Dayaku. Perusahaan melakukan pemberdayaan melalui program

Community of Development (Comdev). Sedangkan LSM melakukan pemberdayaan melalui program pendampingan dan penyuluhan.

Intensitas pemberdayaan di Kabupaten Kutai Kartanegara, semakin tinggi sejak otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia pada tahun 2000. Namun, seperti yang telah disebutkan di bagian depan angka kemiskinan masih tetap tinggi. Artinya, program pemberdayaan masyarakat belum berjalan sesuai harapan. Beberapa penulisan menyebutkan bahwa kurang optimalnya program pemberdayaan, disebabkan oleh kurang tepatnya pendekatan pemberdayaan yang digunakan oleh pelaku pemberdayaan (*Change Agent*). Realitasnya, banyak pendekatan pemberdayaan yang telah digunakan dalam penanggulangan kemiskinan. Namun, berbagai pendekatan tersebut lebih banyak terfokus pada pihak intervensi (pelaku pemberdayaan). Sehingga tidak aneh jika Poli (2005) menyebutkan bahwa awal kegagalan pembangunan adalah karena orang “sok pintar” yang membuat keputusan untuk dikerjakan “orang bodoh”.

Pemberdayaan, di sisi lain pada prinsipnya adalah upaya untuk memberikan kemampuan/daya (*power*) kepada masyarakat sasaran pemberdayaan. Poli (2005) menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah: “Peningkatan kemampuan masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan tanpa menghambat kebutuhan generasi masa depan, dalam konteks sosial budaya, di antara bangsa dan bangsa-bangsa yang bermartabat”. Pendapat Poli ini makin mempertegas bahwa peningkatan kemampuan adalah tujuan dari pemberdayaan, yang secara lebih detail disebutkan oleh Poli (2005) sebagai kemampuan untuk terlepas dari empat dimensi kemiskinan, yaitu: (1) *lack of choice* (kemiskinan ekonomi); (2) *lack of voice* (kemiskinan politik); (3) *lack of status* (kemiskinan sosial); (4) *lack of self-confidence* (kemiskinan percaya diri; psikologis).

Terkait dengan pendapat Poli, maka pemberdayaan selayaknya memperhatikan empat dimensi kemiskinan, sebagai tujuan. Masalahnya adalah, hanya kemiskinan ekonomi yang dapat terlihat jelas, karena memiliki bentuk fisik, seperti pendapatan, dan kepemilikan aset. Sementara kemiskinan dalam

dimensi lain tidak terlihat, karena tidak nampak di permukaan(non fisik). Akibatnya penulisan-penulisan tentang pemberdayaan dan kemiskinan lebih banyak fokus kepada dimensi ekonomi yang nampak secara fisik. Masih jarang penulisan yang melakukan eksplorasi terhadap sesuatu yang tidak tampak, utamanya tentang pemberdayaan dan kemiskinan. Pelepasan diri masyarakat miskin terhadap empat dimensi kemiskinan, di sisi lain juga mengandung konsekuensi. Konsekuensinya adalah terdapat spesifikasi pemberdayaan yang berbeda untuk waktu, tempat, dan pelaku yang berbeda. Konsekuensi ini membuat penulisan ini jelas berbeda dengan penulisan-penulisan terdahulu, karena secara metodologi penulisannya pada sisi-sisi tertentu juga berbeda.

Pemberdayaan masyarakat, seharusnya dapat memiliki satu kesatuan pandangan tentang makna dan tujuan pemberdayaan. Pengungkapan makna dan tujuan pemberdayaan berdasarkan perspektif pelaku pembangunan yang khas di Kabupaten Kutai Kartanegara inilah yang membuat penulisan ini menarik. Tiga pelaku pemberdayaan (pemerintah, perusahaan, dan LSM) bisa saja memiliki pandangan yang sama atau berbeda tentang pemberdayaan. Kesamaan atau ketidaksamaan pandangan adalah masalah pertama yang harus diurai. Sebab, latar belakang ke tiga pelaku pemberdayaan pasti berbeda.

Permasalahan berikutnya akan muncul ketika program pemberdayaan yang dilakukan oleh tiga pelaku dilaksanakan kepada kelompok masyarakat sasaran (*Target Group*). Permasalahan akan muncul dari berbagai kombinasi kemungkinan makna dan tujuan pemberdayaan, meskipun ke tiga pelaku memiliki makna dan tujuan yang sama, apalagi jika berbeda. Sebagai contoh, pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan program Gerbang Dayaku, sangat ideal dan bagus. Namun implementasi program dan pencapaian tujuan pemberdayaan belum tentu dapat terealisasi dengan baik. Degradasi makna pemberdayaan dapat terjadi mengingat pelaksanaan pemberdayaan dilakukan oleh *person* yang belum tentu dapat menangkap makna filosofis dari program pemberdayaan

Gerbang Dayaku.

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat juga tidak boleh mengabaikan *target group*. Pendapat, partisipasi, dan tanggapan *target group* menjadi poin penting, mengingat *target group* adalah pihak yang akan diberdayakan. Penolakan, sikap antipati, dan ketidakpedulian masyarakat, adalah indikasi pengabaian akan pendapat dan tanggapan *target group* terhadap setiap program yang dilaksanakan pelaku pemberdayaan. Pengungkapan pendapat dan tanggapan *target group* terhadap pemberdayaan, di sisi lain juga dapat memetakan *target group* ke dalam berbagai kelompok posisi. Tidak mesti *target group* berada pada posisi “nol”, tentang pemberdayaan. Tidak jarang pengalaman justru menempa *target group* menjadi kelompok yang tahu tentang pemberdayaan, dibandingkan pelaku pemberdayaan sendiri. Jika posisi *target group* telah dipetakan, maka pola pendekatan, program, dan cara pemberdayaan menjadi lebih efektif.

Permasalahan pemberdayaan Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara dapat terungkap dengan jelas, jika penulis dapat memunculkan makna dibalik semua tindakan yang dilakukan pelaku pemberdayaan (*change agent* atau agen perubahan) dan *target group*. Pengungkapan makna tindakan antara *change agent* dan *target group* ini akan menjadi *starting point* untuk mengkaji berbagai program dan pendekatan yang paling tepat bagi masyarakat Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada gilirannya, tujuan pemberdayaan akan lebih mudah tercapai, karena terdapat kesamaan pandangan dan pendapat antara *change agent* dan *target group* dalam memaknai arti pemberdayaan.

BEBERAPA KONSEP TENTANG PEMBERDAYAAN

When you're facing the sun, you will not ever see the shadow (Hellen Keller)

Beberapa Penelitian tentang Pemberdayaan

Overweel (2008) melakukan sebuah studi tentang perubahan sosial-ekonomi dalam masyarakat pesisir untuk membantu perumusan strategi jangka panjang untuk Yayasan Sosial, Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan (YAPSEL). Hasil penulisan Overweel menyebutkan bahwa masyarakat berada pada posisi ketiga dari posisi *Target Group*, yaitu masyarakat yang tidak menyadari bahwa mereka miskin. Pengungkapan posisi masyarakat miskin dilakukan Overweel (2008) dengan mengungkapkan sejarah kehidupan masyarakat.

Ulsan dan Routray (2008) menyebutkan bahwa masalah kemiskinan telah meluas di Bangladesh, meskipun bantuan telah bergulir dari pemerintah, Data empiris telah membuktikan bahwa intervensi LSM membawa dampak yang buruk bagi masyarakat, karena akibat intervensi LSM tersebut telah mengakibatkan kesenjangan antara tujuan-tujuan mereka dan prestasi mereka. Hasil penulisan Adamson (2010) mengidentifikasi hambatan utama untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat adalah masalah kapasitas masyarakat, kapasitas kelembagaan, budaya organisasi dan kerangka regulasi.

Janssens (2010) menyebutkan bahwa program pemberdayaan yang melibatkan masyarakat, secara signifikan meningkatkan kepercayaan dan merangsang kontribusi

masyarakat untuk proyek-proyek komunitas pendidikan dan infrastruktur. Hasil penulisan juga menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang melibatkan masyarakat memiliki eksternalitas yang positif kepada masyarakat yang lebih luas. Rumah tangga yang tidak berpartisipasi dalam program itu sendiri, tetapi yang tinggal di sebuah desa program secara signifikan juga lebih percaya dan lebih mungkin untuk terlibat dalam aksi kolektif rumah tangga daripada di desa kontrol.

May (2008) menemukan bahwa Pemerintah Amerika Serikat telah mulai menerapkan model “*co-management*” perikanan berdasarkan keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*), untuk pengelolaan perikanan. *Stakeholders* terpenting adalah partisipasi nelayan lokal dan masyarakat yang merupakan hal fundamental untuk efisiensi dan efektifitas peraturan dan keberlanjutan perikanan nasional. Penulisan *Llambí, dkk* (2005) memperlihatkan bahwa keberhasilan proyek konservasi partisipatif sangat tergantung pada perhatian yang ditunjukkan oleh penduduk setempat dan pada strategi yang digunakan untuk menggabungkan semua pemangku kepentingan dari tahap awal.

Penulisan ini memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Persamaan dapat dilihat dari tujuan penulisan yang ingin mengungkap proses pemberdayaan secara menyeluruh dalam berbagai dimensi. Namun, terdapat beberapa spesifikasi khusus dalam penulisan ini yang membedakannya dengan penulisan-penulisan sebelumnya. Pertama, penulisan ini memiliki komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) pemberdayaan yang lebih lengkap yaitu pemerintah, perusahaan, dan LSM sebagai *change agent*, di samping masyarakat sebagai *target group*. Sementara penulisan lainnya, cenderung hanya meneliti satu atau beberapa pelaku kepentingan. Kedua, makna pemberdayaan pada setiap lokasi, waktu, dan pelaku pemberdayaan yang berbeda tentu akan berbeda pula. Asumsi ini tentu saja membawa konsekuensi bahwa setiap penulisan yang melakukan pendekatan kualitatif pada tempat, waktu dan pelaku yang berbeda, pasti akan berbeda dengan penulisan-penulisan sebelumnya.

Teori Ekonomi Kelembagaan Baru

Teori Ekonomi Kelembagaan Baru atau *New Institutional Economics* (NIE) secara definitif merupakan sebuah studi multidisipliner yang memiliki beberapa cabang ilmu. Meskipun masih terdapat beberapa perdebatan tentang wilayah kajian dari NIE itu sendiri, namun setidaknya cabang-cabang dari NIE bisa dibagi dalam dua kategori. Pertama, apa yang dikenal sebagai “sejarah ekonomi baru” (*new economic history*, dikembangkan oleh North, Fogel, dan Rutherford) dan aliran pilihan publik (*public choice school*, diperkenalkan oleh Buchanan, Tullock, Bates, dan Olson), yang berfokus pada analisis makro (*institutional environment*). Kedua, teori “ekonomi biaya transaksi” (*transaction cost economics*, diintroduksi oleh Ronald Coase, Oliver Williamson, dan Douglass North) dan “informasi ekonomi” (*economics information*, dikaji oleh Akerlof, Stigler, dan Stiglitz), sekadar menyebut sebagian, yang berfokus pada analisis mikro (*institutional arrangement*) dan bentuk-bentuk tata kelola (*forms of governance*) aktivitas ekonomi (Kherallah dan Kirsten, 2002, dalam Yustika, 2006). Selanjutnya, masih terdapat beberapa cabang lain yang cukup menggugah untuk menjadi bahan kajian, seperti teori ekonomi sosial (*new social economics*) yang dikembangkan oleh Gary S. Becker, teori tindakan kolektif (*collective action theory*) yang diperkenalkan oleh Mancur Olson, dan teori hukum dan ilmu ekonomi (*law and economics*) yang diusung oleh Posner.

Ronald Coase, satu dari *founding fathers* NIE, mengembangkan gagasan tentang organisasi ekonomi untuk mengimbangi gagasan intelektual kebijakan kompetisi dan regulasi industri Amerika Serikat pada dekade 1960-an. Ronald Coase (1937) menganggap organisasi ekonomi bisa dicapai oleh kebebasan ekonomi dan kewirausahaan (*economic and entrepreneurial freedom*). NIE menurut Yustika (2006) menempatkan diri sebagai pembangun teori kelembagaan non-pasar (*non-market institutitons*) dengan pondasi teori ekonomi neoklasik. Seperti yang diungkapkan North (2005) bahwa NIE

masih memakai dan menerima asumsi dasar dari neoklasik mengenai “kelangkaan” dan “kompetisi”, tetapi menanggalkan asumsi rasionalitas instrumental (*instrumental rationality*); di mana asumsi tersebut membuat ekonomi neoklasik menjadi “teori bebas/nir-kelembagaan” (*institution-free theory*). NIE, oleh karena itu mengeksplorasi gagasan kelembagaan non-pasar (hak kepemilikan, kontrak, partai revolusioner, dan lain-lain) sebagai jalan untuk mengompensasi kegagalan pasar (*market failure*). Dalam pendekatan NIE, kehadiran informasi yang tidak sempurna, eksternalitas produksi (*production externalities*), dan barang-barang publik (*public goods*) diidentifikasi sebagai sumber terpenting terjadinya kegagalan pasar, sehingga meniscayakan perlunya kehadiran kelembagaan non-pasar.

Williamson (2000) menyebutkan bahwa NIE beroperasi pada dua level, yakni lingkungan kelembagaan/*institutional environment* (*macro level*) dan kesepakatan kelembagaan/*institutional arrangement* (*micro level*). Williamson (2000) dalam konteks ini mendeskripsikan *institutional environment* ini sebagai seperangkat struktur aturan politik, sosial, dan legal yang memapankan kegiatan produksi, pertukaran, dan distribusi. Aturan mengenai tata cara pemilihan, hak kepemilikan, dan hak-hak di dalam kontrak merupakan beberapa contoh dari kebijakan ekonomi. Sebaliknya, menurut Williamson (2000) level analisis mikro berkutat dengan masalah tata kelola kelembagaan (*institutions of governance*). Singkatnya, *institutional arrangement* merupakan kesepakatan antara unit ekonomi untuk mengelola dan mencari jalan agar hubungan antarunit tersebut bisa berlangsung, baik lewat cara kerjasama maupun kompetisi. Sebuah kesepakatan kepemilikan merupakan *institutional arrangement*, karena di dalamnya mengalokasikan hak-hak kepemilikan kepada individu, kelompok, atau pemerintah.

Teori Agen Perubahan (Change Agent)

Teori *Change Agent* memusatkan perhatian kepada pertentangan antara tindakan dan struktur, dan mencoba menjembatani pemikiran yang dikembangkan dan diperkaya.

Teori *Change Agent* pada prinsipnya dapat diringkas menjadi enam asumsi ontologis, yaitu: 1) Masyarakat merupakan sebuah proses dan mengalami perubahan secara terus menerus. 2) Perubahan kebanyakan berasal dari dalam, berbentuk transformasi dalam dirinya sendiri. 3) *Change Agent* adalah agen individual dan kolektif. 4) Arah, tujuan, dan kecepatan perubahan dipertentangkan di kalangan agen dan menjadi medan konflik dan perjuangan. 5) Tindakan terjadi dalam suasana menghadapi struktur, tindakan ini menghasilkan kualitas dualitas struktur (yang membentuk dan dibentuk) dan dualitas kualitas aktor (yang menghasilkan dan yang dihasilkan), dan 6) pertukaran tindakan dan struktur terjadi secara pelan-pelan dengan cara menukar fase-fase kreatifitas *Change Agent* dan kemandirian struktur.

Perkembangan teori *Change Agent* semakin diakui sebagai bidang utama kajian-kajian sosial. Ini tidak hanya diakui oleh tokoh pertamanya yaitu Margareth Archer, yang menyatakan bahwa masalah struktur dan *Change Agent* sebagai isu mendasar teori-teori sosial modern (Archer, 1988), tetapi juga oleh pengamat-pengamat obyektif lainnya yang telah mengakui bahwa perkembangan teori *Change Agent* ini kan menjadi kajian teoritis terpenting bagi penulisan ilmu-ilmu sosial di masa yang akan datang (Collins, 1986, dalam Syztopka, 1993).

Konsep Target Group

Istilah *Target Group* juga digunakan dalam dunia pemasaran dan periklanan, seperti yang dikemukakan oleh Overweel (2008). Overweel menyebutkan bahwa jika terdapat suatu produk untuk dijual, maka harus ditentukan terlebih dahulu siapa *Target Group* dan selanjutnya meyakinkan orang-orang agar produk yang dijual dapat bermanfaat dan membuat kehidupan menjadi lebih baik. Perumpamaan ini dijadikan Overweel sebagai landasan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Artinya, Overweel (2008) ingin menekankan bahwa pelaku pembangunan juga “menjual” program pembangunan mereka dan mereka juga harus meyakinkan *Target Group* bahwa program tersebut bagus untuk mereka. Penekanan ini dilakukan Overweel dengan sebuah

kalimat; “mungkin analogi yang dijelaskan disini terdengar agak sarkastik, tapi begitulah kenyataannya” (Overweel, 2008; 1).

Overweel (2008) menyebutkan bahwa secara teori *Target Group* terdiri atas tiga segmen, yaitu: a) *Target Group* mengetahui apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan situasi mereka. b) *Target Group* merupakan subjek dari “*culture of poverty*”, dan c) *Target Group* bahkan tidak menyadari bahwa mereka miskin. Pendapat Overweel sejalan dengan teori yang dikemukakan Kotler, bahwa: “segmen pasar terdiri dari kelompok pelanggan yang memiliki seperangkat keinginan yang sama” (Kotler, 2005; 134). Segmentasi pasar perlu dilakukan karena pada umumnya pasar untuk suatu produk atau jasa mempunyai banyak perbedaan terutama pada kebutuhan, keinginan dan daya beli. Dengan melakukan segmentasi pasar, perusahaan akan lebih mudah melayani berbagai kebutuhan dan keinginan pasar tersebut.

Konsep Pemberdayaan

1. Makna Pemberdayaan

Poli (2005) menyebutkan bahwa pemberdayaan rakyat adalah peningkatan kemampuan rakyat atau masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhannya tanpa menghambat pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Namun peningkatan kemampuan rakyat menurut Poli harus dalam konteks sosial-budaya, dan di antara keluarga bangsa dan bangsa-bangsa yang bermartabat. Konsep pemberdayaan menurut Pranarka dan Vidhyandika (dalam Hikmat, 2004; 96), dapat dipandang sebagai: “bagian atau sejiwa sedarah dengan aliran yang muncul pada paruh abad ke-20 yang lebih dikenal sebagai aliran *postmodernisme*”. Aliran ini menitikberatkan pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada jargon antisistem, antistruktur, dan antideterminisme yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Pemahaman konsep pemberdayaan oleh masing-masing individu secara selektif dan kritis dirasa penting, karena konsep ini mempunyai akar historis dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat.

2. Pendekatan dalam Pemberdayaan

Kartasmita (1997) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai jembatan bagi konsep-konsep pembangunan makro. Dalam kerangka pemikiran itu menurut Kartasmita berbagai *input* seperti dana, prasarana dan sarana yang dialokasikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan harus ditempatkan sebagai rangsangan untuk memacu percepatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Proses ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) melalui pemupukan modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh rakyat. Proses transformasi itu harus digerakkan oleh masyarakat sendiri.

Pendekatan lain adalah pendekatan mikro yang digunakan oleh Poli untuk menyebutkan pendekatan dari hati ke hati, yang memungkinkan *change agent* berhubungan langsung dengan *target group*. Poli (2005) menyebutkan pendekatan mikro adalah hubungan langsung dengan pihak yang menjadi obyek pemberdayaan. Hubungan langsung dengan obyek pemberdayaan sangat penting, karena dari hubungan itu dimungkinkan berfungsinya tiga H (*Heart, Head, Hand*) secara terpadu. *Heart* adalah keberpihakan kepada pihak yang dilayani, karena ketaatan pada nilai-nilai tertentu yang dianut, *Head* adalah pikiran yang jernih dan terarah kepada tujuan tertentu yang hendak dicapai, dan *Hand* adalah tindakan yang terarah, berdasarkan pikiran dan hati yang bergerak.

3. Tujuan Pemberdayaan

Poli menyebutkan bahwa tujuan pemberdayaan adalah melepaskan masyarakat miskin dari beberapa dimensi kemiskinan. Tujuan pemberdayaan melepaskan masyarakat miskin dari beberapa dimensi kemiskinan, yaitu a) kemiskinan ekonomi (*lack of choice*); b) *lack of choice* (kemiskinan ekonomi); c) *lack of voice* (kemiskinan politik); d) *lack of status* (kemiskinan sosial); dan e) *lack of self-confidence* (kemiskinan percaya diri; psikologis), (Poli, 2005). Sulistiyani (2004), sementara itu menjelaskan bahwa tujuan

yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah: membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Disebutkan oleh Sulistiyani bahwa kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandanginya tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

4. Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan

Craig dan May menyebutkan bahwa: “partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan”, (Craig dan May, 1995 dalam Hikmat, 2004; 3). Lebih lanjut Hikmat (2004;4) menjelaskan: “pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya”. Partisipasi menurut Hoofsteede (1971) yang dikutip oleh Khairuddin (2000; 46) berarti: “*The taking part in one or more phases of the process*”.

Syahyuti (2006), menyebutkan bahwa partisipasi memiliki beberapa bentuk dan tipe, yaitu: *Co-option*. Tidak ada input atau partisipasi apapun dari masyarakat target. Masyarakat hanya dijadikan obyek pemberdayaan. *Co-operation*. Meskipun telah ada insentif bagi masyarakat, namun program telah didesain oleh pihak luar yang menentukan seluruh agenda dan proses secara langsung. *Consultation*. Opini masyarakat ditanya, namun pihak luar menganalisis informasi sekaligus memutuskan bentuk aksinya sendiri. *Collaboration*. Masyarakat lokal bekerjasama dengan pihak luar untuk menentukan prioritas, dan semua pihak bertanggungjawab langsung kepada proses. *Co-learning*. Masyarakat lokal dan luar saling membagi pengetahuannya, memperoleh saling pengertian, dan bekerjasama untuk merencanakan aksi, sementara pihak luar hanya memfasilitasi. *Collective-action*. Masyarakat lokal menyusun dan melaksanakan

agendanya sendiri, pihak luar absen sama sekali.

Pengungkapan partisipasi masyarakat dalam penulisan ini akan menggunakan pendekatan bentuk dan jenis partisipasi seperti yang diungkapkan oleh Syahyuti (2006), yang menyebutkan bahwa bentuk dan jenis partisipasi adalah bertingkat dan terdiri dari; *co-option*, *co-operation*, *consultation*, *collaboration*, *co-learning*, dan *collective action*.

KERANGKA KONSEP PEMBERDAYAAN DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

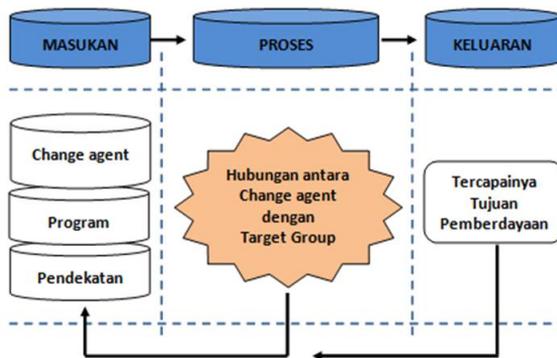
Sometimes, we gain more if we are able to give up our stubborn thought limitations. Never forget to "Think Outside of the Box" (Anonymous)

Change agent seperti yang dikatakan Sztompka (1993) adalah: “penyebab utama kejadian, motor penggerak fenomena dan proses. kekuatan yang bertanggung jawab atas nasib mereka sendiri, yang dapat mendorong dinamika sosial dan penyebab transformasi masyarakat”. Sedangkan *target group* adalah sebutan untuk kelompok sasaran pemberdayaan yang pada dasarnya adalah masyarakat miskin yang perlu untuk diberdayakan. Konsep *target group* mengadopsi konsep ilmu ekonomi yang lazim digunakan dalam strategi pemasaran, seperti yang diungkapkan Overweel (2008).

Change agent adalah agen perubahan baik secara individu maupun kolektif, yang diharapkan dapat merubah tingkat kehidupan *target group* menjadi lebih baik, melalui interaksi-interaksi sosial yang muncul dari hubungan antara kedua pihak ini. Mekanisme pemikiran ini muncul hasil penelitian Overweel dan Teori Morphogenesis dari Archer. Overweel (2008) menyebutkan bahwa: “proses pemberdayaan sudah selayaknya dipandang sebagai konsep yang bertujuan untuk memasarkan produk sehingga memerlukan pengetahuan tentang *target group*”. Sementara Archer (1985) menyebutkan bahwa: “restrukturisasi yang pada dasarnya disebabkan oleh *change agent* dapat

membentuk pola struktural yang tak mungkin terlepas dari pelaksanaan interaksi”. Menurut Archer: “gagasan sentral morphogenesis mengacu pada pertukaran posisi kompleks (antara struktur dan tindakan) yang menghasilkan perubahan bentuk sistem, yang dapat membawa perubahan dalam diri masyarakat”, Archer (1985).

Penggunaan konsep *change agent* dan *target group* sebagai konsep utama dalam penelitian ini, dilandasi oleh pemikiran; 1) Masyarakat sasaran (*target group*) merupakan sebuah proses dan mengalami perubahan secara terus menerus. 2) Perubahan kebanyakan berasal dari dalam, berbentuk transformasi dalam dirinya sendiri. 3) *change agent* adalah agen individual dan kolektif. 4) Arah, tujuan, dan kecepatan perubahan dipertentangkan di kalangan agen dan menjadi medan konflik dan perjuangan. 5) Tindakan terjadi dalam suasana menghadapi struktur, tindakan ini menghasilkan kualitas dualitas struktur (yang membentuk dan dibentuk) dan dualitas kualitas aktor (yang menghasilkan dan yang dihasilkan), dan 6) pertukaran tindakan dan struktur terjadi secara pelan-pelan dengan cara menukar fase-fase kreatifitas *change agent* dan kemandirian struktur.



Terdapat tiga pelaku pemberdaya (*change agent*) di Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu pemerintah, perusahaan, dan LSM. Istilah *change agent* adalah istilah

Sumber: Diolah, 2009.
Gambar 3.1. Kerangka Pemikiran Penelitian

yang muncul sejak awal sejarah manusia untuk penyebutan penyebab utama kejadian, motor penggerak fenomena dan proses, kekuatan yang bertanggung jawab atas nasib mereka sendiri, yang

dapat mendorong dinamika sosial dan penyebab transformasi masyarakat. Penggunaan konsep *change agent* ini utamanya berasal dari Teori Morphogenesis dari Archer (1985).

Ketiga *change agent* adalah; pemerintah, perusahaan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Masing-masing *change agent* memiliki pandangan sendiri-sendiri tentang makna pemberdayaan masyarakat. Masing-masing pandangan akan menciptakan paling tidak tiga kombinasi pandangan tentang makna pemberdayaan. Pertama, *change agent* memiliki pandangan yang sama. Kedua, *change agent* memiliki pandangan yang berbeda. Ketiga, *change agent* memiliki pandangan yang sebagian sama, dan sebagian lagi berbeda. Komparasi pandangan *change agent* terhadap makna pemberdayaan, akan menuntun peneliti untuk membuat dugaan terbaik tentang makna dan tujuan pemberdayaan di Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara.

Change agent berdasarkan masing-masing pandangan mereka terhadap makna dan tujuan pemberdayaan mewujudkan program pemberdayaan. Wujud dari program pemberdayaan itu adalah dalam bentuk pelaksanaan program-program pemberdayaan dan bentuk pendekatan pemberdayaan. Pelaksanaan program pemberdayaan melalui berbagai pendekatan pemberdayaan bisa saja mengandung distorsi. Distorsi pelaksanaan program dari makna dan tujuan pemberdayaan masing-masing *change agent*, dapat muncul mengingat tidak semua pelaksana pemberdayaan mengerti makna dan tujuan pemberdayaan berdasarkan pandangan *change agent*.

Paling tidak terdapat beberapa kemungkinan distorsi yang muncul; pertama, makna dan tujuan pemberdayaan sudah ideal tetapi program yang dimunculkan kurang dapat mewujudkan makna dari program dan tujuan pemberdayaan yang sudah ideal tersebut. Kedua, makna dan tujuan sudah ideal, program juga sudah ideal, tetapi pelaksanaan program tidak menggunakan pendekatan dan cara yang benar. Ketiga, makna dan tujuan, program serta pelaksanaan program sudah ideal dan benar, namun ditolak oleh *target group*.

Tiga kemungkinan distorsi pemberdayaan tersebut, dapat terjadi jika *change agent* mengabaikan *target group*. “Penggunaan kata “*target group*” dimulai di tahun 70-an di masa-masa awal pembangunan”, (Overweel, 2008). Kata ini diartikan sebagai perhatian yang patut diberikan kepada masyarakat paling miskin, sebagai kebalikan dari bantuan pembangunan infrastruktur yang sudah ketinggalan zaman seperti pembangunan jembatan dan RS yang tampaknya lebih bermanfaat bagi mereka yang bisa mengaksesnya. Penolakan, sikap antipati, dan ketidakpedulian masyarakat, adalah indikasi pengabaian akan pendapat dan tanggapan *target group* terhadap setiap program yang dilaksanakan pelaku pemberdayaan.

Pemahaman tentang pendapat dan tanggapan *target group* terhadap pemberdayaan, akan membuat peneliti dapat mengelompokkan *target group* ke dalam berbagai kelompok, yang menurut Overweel (2008): “Secara teori, dalam situasi semacam ini ada beberapa hubungan yang mungkin antara LSM dan *target group* pada umumnya, yaitu: 1) *Target group* mengetahui apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan situasi mereka. Peran LSM disini hanya sebagai fasilitator. 2) *Target group* merupakan subjek dari “*culture of poverty*”. LSM bergerak lebih aktif dalam meyakinkan *target group* bahwa mereka memiliki potensi untuk menjadikan situasi mereka menjadi lebih baik. 3) *Target group* bahkan tidak menyadari bahwa mereka miskin. Ini berlaku terutama pada masyarakat tradisional yang masih hidup dengan cara sangat tradisional.

Pengungkapan posisi posisi *target group* dapat dimungkinkan jika peneliti menggali lebih dalam tentang sejarah *target group*, terutama pengalaman mereka sebelumnya terhadap pemberdayaan. Pengungkapan sejarah akan dikerucutkan kepada tiga hal penting, yaitu: 1) Apa yang pernah terjadi dari luar, 2) Apa yang pernah dilakukan dan dibuat sendiri (dari dalam), dan 3) Apa hasilnya, dari kedua bentuk pengalaman sebelumnya.

Pola hubungan antara *change agent* dengan *target group* pada prinsipnya adalah proses pemberdayaan dari program dan pendekatan yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam

pemberdayaan. Pola hubungan akan berjalan serasi dan selaras jika terdapat kesamaan pendapat dan pandangan akan makna, program, dan pendekatan pemberdayaan dari *change agent* dan *target group*. Jika pola hubungannya serasi dan selaras, maka proses pemberdayaan akan berjalan dengan baik dan pencapaian tujuannya akan optimal. Sebaliknya jika tidak seimbang, maka proses pemberdayaan cenderung akan gagal. Meskipun demikian, ketidakseimbangan hubungan antara *change agent* dengan *target group*, dapat saja dikoreksi di awal proses, di tengah proses, ataupun di akhir proses pemberdayaan. Artinya, setiap tahapan proses pemberdayaan bisa menjadi umpan balik (*feed back*), sebagai usaha untuk menemukan model pemberdayaan yang tepat.

Overweel (2008), lebih jauh menyebutkan bahwa: “latar belakang suatu aktivitas pembangunan haruslah mempertimbangkan budaya dari suatu masyarakat target”. Di tahun 70-an, salah seorang pionir dalam studi mengenai perubahan budaya dan pembangunan ekonomi di Papua New Guinea, Cyril Belshaw, mencatat bahwa meskipun masyarakat yang saya diskripsikan (*The Southern Massim di PNG*) telah mencapai *progres* yang memuaskan (secara ekonomi) dalam bidang-bidang tertentu, mereka masih memerlukan bantuan dan petunjuk untuk perubahan yang lebih baik. Perubahan ini, jika tidak didasarkan pada konteks kultural, cenderung akan mengakibatkan keburukan dibanding kebaikan. Tulisan Overweel ini mempertegas bahwa pandangan dan pendapat *target group* sangat penting, agar jangan sampai program pemberdayaan malah akan membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih buruk, bahkan jika dibandingkan dengan tidak adanya program pemberdayaan.

“MENGUNGKAP DAN MENANGKAP” PANDANGAN STAKEHOLDER PEMBERDAYAAN

Walaupun kita mengetahui nama latin bunga mawar, namun kita bisa gagal mengetahui hakikat bunga mawar tersebut, tanpa mencium wanginya (Terjemahan bebas dari Eisner 1981, 9)

Buku ini adalah hasil penulisan ulang hasil penelitian yang dilakukan penulis. Dengan demikian pemaparan berikut adalah metode yang dilakukan penulis saat melakukan penelitian.

Pendekatan dan Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian untuk mengungkap makna pemberdayaan sebagai obyek penelitian. Namun, mengingat obyek penelitian melekat pada subyek, maka yang peneliti amati adalah subyek penelitian yang melakukan kegiatan pemberdayaan. Subyek penelitian yang telah diamati oleh peneliti adalah; pemerintah, perusahaan, LSM, dan Masyarakat. Pengamatan dilakukan terhadap hubungan antara pemerintah, perusahaan, LSM, dan masyarakat (pemangku kepentingan). Proses pengamatan dilanjutkan peneliti dengan memahami bahasa dan penafsiran keempat pemangku kepentingan tentang apa yang terjadi di sekitarnya, tanpa peneliti terlibat di dalamnya (peneliti dalam keadaan diam). Proses pengamatan peneliti terhadap hubungan dan kehidupan pemangku kepentingan dilakukan dengan wajar dan alamiah. Hal ini sesuai dengan saran Moleong yang menyatakan: “Pendekatan penelitian kualitatif bersifat alamiah dan menghendaki keutuhan”, (Moleong, 1993).

Saat pelaksanaan penelitian, peneliti hadir ke lokasi

penelitian, dengan sedapat mungkin tidak mengganggu atau mengubah suasana (kondisi) yang ada. Peneliti menyesuaikan diri, baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik, peneliti menyesuaikan cara berpakaian dan penampilan yang disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat wilayah pesisir. Bercelana pendek, menggunakan kaos oblong, dan hanya memakai sandal jepit, serta tidak menggunakan alat elektronik/komunikasi apapun, adalah penyesuaian peneliti terhadap kondisi kehidupan masyarakat. Secara psikis, peneliti mencoba berfikir dan bertindak sesuai dengan kebiasaan dan pola pikir (*mindset*) masyarakat wilayah pesisir. Peneliti ikut melaut mencari ikan, memperbaiki jala dan alat pancing, serta memperbaiki roda penggerak perahu. Pembicaraan, peneliti batasi hanya untuk materi yang dimengerti masyarakat, seperti sepakbola atau figur calon bupati yang saat itu sedang gencar melakukan kampanye.

Proses penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Bogdan Biklen, yang menyatakan: “penelitian kualitatif berkenaan dengan proses, dan memiliki medan yang alami sebagai sumber data”, (Bogdan dan Biklen, 1982). Merasuk kehidupan masyarakat adalah bentuk keinginan peneliti untuk menciptakan medan yang alami (*natural setting*), yang menurut Nasution ialah: “peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi yang wajar, sebagaimana adanya tanpa dipengaruhi dengan sengaja”, Nasution (1992).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Pesisir Kecamatan Anggana Kutai Kertanegara. Pertimbangan daerah ini sebagai lokasi penelitian adalah: (1) Rumah Tangga Miskin lebih terkonsentrasi di wilayah pesisir Kecamatan Anggana; (2) Intensitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat relatif tinggi; (3) pelaku pemberdayaan (*change agent*) paling lengkap; yang terdiri dari pemerintah, perusahaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan (4) Heterogenitas masyarakat yang tinggi, baik dari aspek etnis, strata sosial, ekonomi, dan politik.

Pengumpulan data penelitian telah dilakukan sejak penyusunan draft proposal (Awal Mei 2008), dan berakhir pada bulan Desember 2009. Keputusan penghentian penelitian berdampak pada tingkat kedalaman pembahasan. Artinya, tingkat kedalaman pembahasan (penembusan “kura-kura” penelitian¹) adalah sedalam “kura-kura” pada bulan Desember 2009. Peneliti harus cukup puas dengan data yang telah diperoleh dan pembahasan yang telah dibuat. Oleh karena itulah, pada bagian akhir disertasi ini akan direkomendasikan beberapa penelitian lanjutan, sebagai wujud dari ketidakpuasan peneliti terhadap pengungkapan makna obyek penelitian yang belum tuntas.

Informan Penelitian

Penelitian ini terdiri dari beberapa informan kunci sebagai sampel penelitian, yang ditetapkan secara *purposive* berdasarkan tujuan atau obyek penelitian yang sudah ditentukan di dalam tujuan penelitian. Teknik penetapan sampel *purposive* digunakan, dengan tujuan untuk menjamin ketepatan dan kelengkapan informasi yang dibutuhkan.

Dasar penentuan informan kunci adalah jika seorang calon informan memiliki dan mau mengungkapkan pengetahuan tentang obyek penelitian yang akan dibahas, maka calon informan tersebut yang akan dipilih. Selanjutnya untuk menjamin pemilihan informan kunci memenuhi syarat (*eligible*), maka informan kunci harus berdasarkan kelompok subyek penelitian yang telah ditentukan. Artinya, informan kunci dari pemerintah misalnya, haruslah informan yang merupakan representasi pemerintah, yang memiliki banyak pengetahuan dan terlibat langsung dalam setiap proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah.

¹ Kura-kura penelitian mengacu pada filsafat India yang menyebut bahwa kedalaman lapisan bumi disangga oleh tujuh kura-kura. Jika telah menembus kura-kura pertama, maka masih ada kura-kura berikutnya. Akhir penembusan kura-kura sebelumnya, adalah awal dari penembusan kura-kura berikutnya. Proses ini tidak pernah berakhir, karena akan selalu ada kura-kura berikutnya. Filsafat ini sering digunakan oleh peneliti kualitatif untuk menggambarkan proses penelitian yang hakekatnya adalah sebuah proses yang berkelanjutan.

Demikian pula untuk kelompok subyek penelitian lainnya, yaitu perusahaan, LSM, dan masyarakat.

Penyebutan nama informan kunci dalam penelitian ini adalah dalam bentuk inisial, mengingat mayoritas informan kunci tidak menghendaki namanya disebut dalam penelitian. Meskipun terdapat beberapa informan kunci yang bersedia disebutkan namanya, namun untuk beberapa informasi penting, tetap meminta untuk tidak menyebutkan nama. Informasi penting yang peneliti maksud adalah terutama ketika informan kunci memberikan penilaian terhadap kinerja pemberdayaan yang dilakukan oleh kelompoknya sendiri.

Tabel 4.1 Sampel, Sumber Data, Informan dan Teknik Pengambilan Sampel Penelitian

Sampel Berdasarkan Tujuan	Sumber Data	Informan Kunci	Teknik Pengambilan Sampel
1. Makna dan tujuan Pemberdayaan menurut <i>Change Agent</i> 2. Program dan Pendekatan Pemberdayaan	Pemerintah	1. ES (Kabid Pemerintahan) 2. A (Kasubid PMD)	<i>Purposive</i>
	Perusahaan	1. AS (Anggota Tim Comdev) 2. Z (Fasilitator Comdev)	<i>Purposive</i>
	LSM	1. NA (LSM BMM) 2. SW (LSM LFSKT)	<i>Purposive</i>
3. Makna Pemberdayaan menurut <i>Target Group</i>	Masyarakat	1. S (Desa Tani Baru) 2. AD (Desa Sepatin)	<i>Purposive</i>
4. Partisipasi dan Tanggapan <i>Target group</i>	Masyarakat	12 (dua belas orang masyarakat *)	<i>Purposive</i>

Keterangan: *) = Informan, tapi bukan Informan Kunci
Sumber: Diolah Peneliti, 2009.

Mengacu pada Tabel 4.1, proses pemilihan informan kunci dalam penelitian ini adalah:

a) Pemerintah

Peneliti menetapkan Pemerintah Kecamatan Anggana sebagai representasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam struktur Kecamatan Anggana, pejabat yang menangani pemberdayaan adalah A dalam jabatan Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat (Kasubbid PMD). Namun, saat peneliti menemui Camat Anggana, peneliti malah diarahkan untuk menemui ES yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan. Saat bertemu untuk memperkenalkan diri kepada ES dan A, kesan pertama peneliti adalah ES jauh lebih familiar dan cepat akrab dengan peneliti. ES ternyata adalah pejabat lama dalam jabatan Kasubbid PMD. Sedangkan A baru 2 tahun berselang masuk dalam struktur kecamatan.

ES, selain lama menjabat sebagai Kasubbid PMD, juga bergelar Magister Manajemen, dan berlatar belakang etnis Jawa yang menikahi wanita suku Kutai. A tetap dipertahankan sebagai salah satu informan kunci mengingat keharmonisan A yang juga dekat dengan masyarakat, selain A juga adalah salah satu pejabat yang berasal dari etnis Bugis. Penilaian peneliti, akan lengkap jika informan kunci yang berasal dari pemerintah terdiri dari A yang memiliki karakteristik Bugis dan pejabat baru, dan ES yang memiliki karakteristik Jawa, dan pejabat lama. Etnis menjadi penting mengingat bahwa tindakan seseorang banyak dipengaruhi latar belakang dan cara berfikir seseorang. Etnis adalah satu representasi dari latar belakang dan cara berfikir seseorang. Di samping itu, Etnis Bugis dan Jawa, selain Banjar dan Kutai adalah etnis mayoritas yang ada di Kecamatan Anggana.

b) Perusahaan

PT. Total E&P Indonesia adalah representasi perusahaan yang ada di Kecamatan Anggana. Menjadi representasi perusahaan, karena PT. E&P Indonesia adalah perusahaan terbesar dan memiliki program *community of development* (Comdev) yang paling banyak disebut-sebut masyarakat. Kantor Comdev PT.

Total E&P Indonesia berada di lantai V Gedung Biru BRI di Kota Balikpapan. Saat peneliti menemui manajemen Comdev PT. Total E&P Indonesia di kantornya, peneliti diarahkan untuk langsung menemui team comdev area Anggana, yang kesehariannya lebih banyak berada di Kecamatan Anggana.

AS direkomendasikan oleh ES (Kabid Pemerintahan) sebagai salah satu anggota team comdev yang tepat untuk dijadikan salah satu informan kunci. Tepat, karena menurut ES, AS adalah anggota team yang paling lama menangani comdev di Kecamatan Anggana, di samping karakter orangnya yang cepat akrab, dan suka berterus terang. AS, ternyata juga seorang yang lama berkecimpung dalam dunia LSM di Jawa dan Sumatra, sebelum masuk kedalam team Comdev PT. Total E&P Indonesia. Sedangkan Z, direkomendasikan oleh AS sebagai salah satu informan kunci, mengingat jabatan Z sebagai supervisor comdev. Z menjadi salah satu informan kunci yang tepat mengingat Z lahir dan besar di Kecamatan Anggana, dan memiliki etnis Kutai. Sejak direkrut sebagai supervisor Comdev PT. Total E&P Indonesia, Z masih berdomisili di Kecamatan Anggana, dan memiliki aktifitas sosial yang cukup banyak di lingkungannya.

c) LSM

Jumlah LSM di Kabupaten Kutai Kartanegara menurut catatan Kesbanglinmas berjumlah 532 LSM. Tercatat 88 LSM beroperasi dan berdomisili di Kecamatan Anggana. Saat peneliti menelusuri alamat beberapa LSM, sangat sulit menemukan LSM dimaksud. Tidak jarang LSM hanya merupakan papan nama, bahkan ada beberapa LSM yang hanya mencantumkan nama dan alamat pada akta notaris, namun alamat dimaksud adalah rumah kosong, bahkan ada yang hanya lahan kosong. Ada beberapa LSM yang peneliti temukan dari hasil penelusuran daftar LSM yang diberikan Kantor Kesbanglinmas, namun sangat tidak representatif untuk dijadikan sebagai informan kunci, karena sudah tidak aktif lagi.

LSM Bina Masyarakat Mandiri (LSM BMM), peneliti temukan secara tidak sengaja, saat melakukan diskusi masalah lingkungan dan pertambangan di *The Jawa Post Institute pro Otonomy Area Kaltim* (JPIP Area Kaltim). NA sebagai salah seorang pendiri LSM BMM berbicara banyak dalam diskusi tersebut. Setelah saling mengenal dengan NA, peneliti menjadikannya sebagai salah satu informan kunci. Karakter NA tepat dijadikan informan kunci, mengingat NA lahir di Kecamatan Anggana, dari keluarga yang tidak berada. Sejak usia sekolah NA membiayai sekolahnya sendiri, melakukan pekerjaan apa saja, mulai dari menjajakan kue, memotong rumput, dan menjual koran. Semua dilakukan agar bisa sekolah. Saat ini NA adalah pengajar di salah satu PTS di Samarinda, selain beraktivitas dalam dunia penelitian dan LSM di Kecamatan Anggana.

Sedangkan SW sebagai pendiri Lembaga Fokus Survey Kaltim (LFSK) dikenal peneliti melalui jejaring sosial *facebook*. Keputusan peneliti menjadikan SW sebagai salah satu informan kunci disebabkan karena pandangan-pandangannya yang kritis terhadap pemberdayaan di Kalimantan Timur. Selain itu, LFSK juga paling intensif berkiprah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pekerjaan utama SW adalah dosen di salah satu PTS lainnya, sekaligus juga sebagai wartawan di salah satu harian di Kalimantan Timur.

d) Masyarakat

Informan kunci dari masyarakat diambil dari dua kelompok ekstrim masyarakat yang ada di Kecamatan Anggana. Kedua kelompok itu adalah kelompok pancing dan kelompok ikan. S mewakili masyarakat pancing (masyarakat yang tinggal di darat). S direkomendasikan oleh ES (Kabid Pemerintahan Kecamatan Anggana). S adalah seorang ketua RT yang melakukan transmigrasi lokal ke Kecamatan Anggana. Sampai sekarang S masih tinggal di eks UPT dan memiliki mata pencaharian bertani dan berkebun. S aktif dalam organisasi kemasyarakatan di lingkungannya.

Informan kunci yang merupakan wakil masyarakat ikan (masyarakat yang tinggal di laut) adalah AD, yang direkomendasikan oleh Sekretaris Desa. AD adalah seorang perantau dari Sulawesi yang awalnya bekerja di perusahaan kayu, yang saat perusahaannya bangkrut, pindah bekerja menjadi pekerja tambak di Kecamatan Anggana. Penetapan AD menjadi informan kunci dipandang peneliti tepat, mengingat AD adalah sosok yang memiliki pengalaman yang lengkap hidup di daerah pesisir. AD pernah membuka lahan tambak sendiri, namun gagal. Lalu AD bekerja sebagai buruh tambak pada salah seorang kerabatnya.

Khusus untuk topik partisipasi dan tanggapan *target group* terhadap program pemberdayaan yang dilakukan *change agent* terdiri dari duabelas orang informan. Keduabelas orang tersebut peneliti peroleh dari rekomendasi yang diberikan oleh S mewakili masyarakat pancing, dan AD mewakili kelompok ikan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Uraian ketiga teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1) Pengamatan

Peneliti terlibat langsung dengan kegiatan kehidupan masyarakat pesisir Kecamatan Anggana, utamanya yang terkait pada pemberdayaan masyarakat. Proses pengenalan, bergaul, melaut, menghadiri kenduri, dan kegiatan khas masyarakat desa lainnya di lokasi penelitian juga dilakukan oleh peneliti. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah awal dan pembuka kegiatan utama peneliti dalam melakukan penelitian. Masyarakat di wilayah pesisir tidak mudah untuk menerima “orang baru” dalam kehidupan mereka. Akibatnya, proses pembauran peneliti dengan masyarakat memerlukan waktu yang cukup lama (1 tahun). Peneliti sampai memerlukan tinggal di lokasi penelitian. Hal ini sesuai seperti

yang disarankan oleh Spradley (1980): “*as participant observer, you will need to increase your introspectiveness. Inreal sense, you will learn to use yourself as a research instrument*”.

Skenario pengamatan yang dilakukan adalah mengamati pola hubungan antara pemangku kepentingan dalam bentuk aktualisasi aksi dan reaksi antara pemangku kepentingan dalam setiap proses pemberdayaan. Aksi salah satu dari *change agent* akan mengundang reaksi dari *change agent* dan *target group*. Misalnya saat ada luncuran program pemberdayaan pembuatan jalan baru, peneliti mengamati aksi dan reaksi pelaku mulai dari proses perencanaan yang dibuat oleh *change agent* sampai dengan program tersebut dilaksanakan di *target group*.



Proses pengamatan secara umum, dilakukan sejak proses umum pemberdayaan, yaitu mulai dari penyerapan aspi-

Sumber: Spradley (1980), yang dimodifikasi.

Gambar 4.1. Proses Pengamatan dalam Penelitian

rasasi melalui Musrenbang (baik desa sampai dan tingkat kecamatan), sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan. Pengamatan umum tentang proses pemberdayaan ini, mengantar peneliti melakukan pengamatan yang lebih terfokus. Pengamatan terfokus yang peneliti putuskan adalah terdiri dari tiga hal, yaitu: Pertama, pengungkapan makna pemberdayaan baik menurut *change agent*, maupun *target group*. Kedua, pengungkapan program dan pendekatan pemberdayaan *change agent*, dan Ketiga pengungkapan partisipasi dan tanggapan *target group* terhadap pemberdayaan yang dilakukan *change agent*.

Tiga fokus pengamatan terhadap obyek penelitian yang sudah ditentukan peneliti, mengantarkan peneliti untuk hanya mengamati subyek penelitian secara selektif. Karena, obyek penelitian hanya bisa diamati melalui gerak dan tingkah laku subyeknya, yaitu para pemangku kepentingan. Pengamatan selektif terhadap pemangku kepentingan dalam setiap kegiatan yang menyangkut tiga obyek penelitian adalah pengamatan terhadap pemerintah, perusahaan, LSM, dan masyarakat.

Perasaan peneliti dalam setiap proses pengamatan menjadi sangat penting, mengingat penelitian ini diarahkan untuk menemukan makna pemberdayaan yang tidak tampak (nonfisik), yang dipicu dari kegiatan pemberdayaan yang tampak (fisik). Sesuatu yang tidak tampak ini hanya dapat dirasakan dengan perasaan. Hal ini sejalan dengan Teori Phenomena yang dijelaskan Immanuel Kant (dalam Poli, 2005) yang menyebutkan bahwa: *Obyek pengamatan dinamakan das Ding an Sich ("the thing in itself"; benda tersebut pada dirinya sendiri), yang tidak mungkin dialami pengamat". Sementara pengamat hanya dapat merasakan gejala (phenomenon) yang terjadi di dalam diri pengamat melalui data indrawi dari obyek pengamatan (das Ding an Sich).*

2) Wawancara

Wawancara dilakukan setelah memperoleh temuan dari setiap proses pengamatan yang telah dilakukan. Isi wawancara menyangkut pandangan-pandangan informan kunci tentang: makna pemberdayaan menurut *change agent* dan *target group*, program dan pendekatan *change agent*, dan partisipasi serta tanggapan *target group* terhadap pemberdayaan yang dilakukan *change agent*. Sementara itu, jenis wawancara yang dilakukan peneliti adalah jenis wawancara tidak terstruktur yang sangat tergantung dari arah pembicaraan informan kunci. Pedoman wawancara adalah "prespektif emik", yaitu salah satu pedoman wawancara yang

menekankan pandangan (pendapat) atau persepsi dari informan kunci.

Proses saling mengenal antara peneliti dan informan kunci pada saat pengamatan (yang telah dilakukan sebelumnya) sangat membantu dalam mengkondisikan pelaksanaan wawancara yang efektif. Efektifitas wawancara dapat dimungkinkan karena peneliti dan informan kunci telah saling mengenal satu sama lain dengan cukup akrab. Meskipun begitu, tidak jarang peneliti harus mengulang proses wawancara dalam kesempatan lain, hanya untuk menangkap arti sesungguhnya dari pandangan informan kunci. Pengulangan dapat juga terjadi jika peneliti merasa bahwa pandangan informan kunci adalah tidak jujur. Kasus seperti ini banyak terjadi pada obyek penelitian partisipasi dan tanggapan *target group* terhadap pemberdayaan *change agent*.

3) Dokumentasi

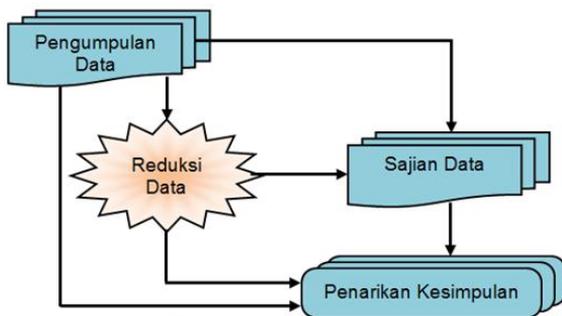
Dokumentasi digunakan untuk mendukung data yang ditemukan dalam proses pengamatan dan wawancara. Meski dokumen hanya merupakan data yang tampak (*sense of data*), namun berguna sebagai salah satu pengantar peneliti memahami, mendalami dan mengungkapkan sesuatu yang tidak tampak, yang merupakan tujuan utama dalam penelitian ini. Beberapa dokumen yang diperoleh peneliti adalah:

- a) Buku Putih, Buku Biru, dan Buku Merah Program Gerbang Dayaku
- b) Laporan pelaksanaan Comdev PT. Total E&P Indonesia
- c) Podes Kecamatan Anggana Tahun 2009
- d) Laporan Musrenbang Desa dan Kecamatan di Kecamatan Anggana.

Teknik Analisis Data

Data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai proses pengumpulan data akan dianalisis untuk diperoleh maknanya. Analisis data terdiri dari komponen reduksi data, sajian

data, dan penarikan kesimpulan. Komponen tersebut saling berinteraksi dan merupakan kegiatan siklus. Reduksi data yang peneliti lakukan adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian,



Sumber: Diolah, 2009
Gambar 4.2 Proses Analisis Data

dan penyederhanaan data yang muncul dari hasil pengamatan dan wawancara di lapangan. Pengamatan dan wawancara di lapangan memuat sangat banyak data. Banyaknya data disebabkan

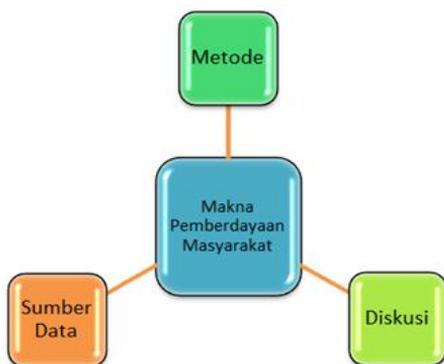
karena dalam proses pengamatan dan wawancara tidak selalu saling berurutan, sehingga tidak dalam satu kesatuan yang utuh dan berurutan. Misalnya, jika saat ini dilakukan pengamatan atau wawancara terhadap perusahaan, kegiatan berikutnya bisa saja terhadap *target group*. Untuk menjadikan hasil wawancara dan pengamatan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, maka peneliti telah menyederhanakan, menyingkat, merangkum, dan memilih hanya data yang penting dan relevan. Proses reduksi yang dilakukan peneliti, ternyata harus dilakukan berulang-ulang guna menghindari adanya kekeliruan dalam reduksi data. Sering peneliti temukan bahwa data yang bagus, ternyata bukanlah data yang benar. Atau data yang benar belum tentu bagus.

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan peneliti setelah reduksi data adalah sajian data. Peneliti menyajikan data yang telah direduksi itu dalam bentuk tulisan (kata-kata), yang dilengkapi dengan grafik, gambar, atau tabel. Tujuan sajian data ini adalah untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang mudah diraih sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi, sehingga mempermudah pengambilan makna antara data yang satu dengan yang lainnya.

Penarikan kesimpulan merupakan proses yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya reduksi data. Data yang berkaitan dengan makna, program dan pendekatan pemberdayaan masyarakat sejak awal penelitian sudah peneliti tafsirkan. Tujuan peneliti adalah untuk menyimpulkan makna dari data tersebut. Namun, penyimpulan makna tidak mudah untuk dilakukan, sering peneliti merasakan bahwa kesimpulan yang telah dibuat belum jelas atau mantap. Konsekuensinya, peneliti kembali mengumpulkan data sampai kesimpulan yang diambil jelas memadai. Tidak jarang, proses pengulangan ini terus berlangsung. Obyek penelitian yang paling sering dilakukan pengulangan penafsiran adalah tanggapan dan partisipasi masyarakat terhadap program pemberdayaan yang dilakukan oleh *change agent*. jika kasus seperti ini yang terjadi, maka peneliti menghentikan proses pengulangan dengan kesimpulan terakhir, sebagai salah satu bentuk otoritas peneliti.

Pengujian Validitas Data

Data hasil penelitian yang telah terkumpul, peneliti uji keabsahan atau validitas datanya dengan teknik triangulasi data, sehingga data dan informasi yang peneliti temukan menjadi relevan. Relevansi data dengan obyek penelitian melalui teknik triangulasi inilah, yang membuat data dan informasi yang ditemukan benar dan representatif.



Sumber: Diolah, 2009.

Gambar 4.3 Teknik Triangulasi Data dalam Penelitian

Pengujian validitas temuan dengan triangulasi dilakukan melalui pengujian sumber data (informan kunci), diskusi dan metode. Pengujian informan kunci adalah membandingkan pandangan masing-masing informan kunci tentang pemberdayaan. Per-

bandingan pandangan tentang makna, program dan pendekatan pemberdayaan menurut *change agent* dilakukan dengan membandingkan pandangan *change agent* dengan pandangan *change agent* lainnya, dan pandangan *target group*. Demikian pula sebaliknya, pandangan *target group* tentang makna pemberdayaan dan partisipasi *target group* akan dibandingkan dengan pandangan *target group* lainnya dan *change agent*.

Perbandingan pandangan antara pemangku kepentingan (*change agent* dan *target group*) dilakukan peneliti dengan membandingkan catatan harian peneliti untuk setiap pandangan informan kunci dalam obyek penelitian yang sama. Perbandingan pandangan juga peneliti lakukan dengan mengkondisikan diskusi tidak langsung antara informan kunci yang secara kebetulan berada di lokasi peneliti sedang melakukan wawancara dengan informan kunci lainnya. Pengujian validitas juga peneliti lengkapi dengan pengujian metode. Mengingat metode pengumpulan data yang digunakan peneliti ada tiga metode, maka hasil temuan juga membandingkan hasil dari metode pengumpulan data, yaitu; pengamatan peneliti, hasil wawancara, dan hasil penelaahan dokumentasi.

Tinggi atau rendahnya validitas hasil temuan peneliti putuskan dengan aturan: jika hasil pengamatan peneliti atau tanggapan peserta diskusi mendukung sebuah pandangan, maka temuan tersebut memiliki validitas yang memadai, sebaliknya menolak berarti validitasnya rendah. Semakin banyak yang mendukung sebuah pandangan, maka validitas temuan akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin sedikit dukungan pada sebuah pandangan, maka semakin rendah validitas temuan tersebut.

Bab 5

SENSE OF DATA: POTRET PEMBERDAYAAN

“Only when you overcome the crisis of self-confidence can opportunity make a difference to your life. But we act with programs as if opportunity carries with it elements of self-confidence. And it does not” (David Osborne & Ted Gaebler, Reinventing Government, p. 65)

A. Anggana: Miskin di Kabupaten Terkaya



Sumber: Diolah Penulis dari Potensi Desa, 2009.

Gambar 5.1 Karakteristik Kecamatan Anggana

Kecamatan Anggana adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Kartanegara dikenal sebagai kabupaten terkaya di Indonesia, karena APBD ber-kisar 5 Triliun Rupiah setiap tahunnya. Kecamatan Anggana adalah salah satu kecamatan terpenting di Kabupaten Kutai Kartanegara, karena di kecamatan inilah areal terbesar pertambangan minyak dan gas bumi dilakukan. Saat ini

terdapat beberapa perusahaan besar yang beroperasi, di antaranya adalah Chevron Indonesia, TAC Pertamina-Medco E&P Indonesia, Total E&P Indonesia, dan VICO Indonesia. Selain memiliki kandungan minyak bumi dan gas (Migas) yang besar, Kecamatan Anggana juga memiliki kandungan batubara berkualitas tinggi.

Kandungan Migas dan Batubara yang besar membuat Kecamatan Anggana menjadi penyumbang dana perimbangan yang besar bagi Kabupaten Kutai Kartanegara. Meski diakui sebagai kecamatan penyumbang dana perimbangan terbesar bagi Kabupaten Kutai Kartanegara, namun pembangunan di daerah ini bergerak tidak secepat pembangunan di pusat kabupaten, yaitu di Kota Tenggarong. Keterisoliran wilayah dari pusat kabupaten ditengarai sebagai salah satu penyebab lambatnya gerak pembangunan di kecamatan pesisir ini.

Kecamatan Anggana seperti layaknya wilayah pesisir, masih tergolong ke dalam kelompok daerah yang miskin. Kemiskinan tergambar dari kondisi masyarakatnya yang masih didominasi oleh keluarga pertanian tradisional, di samping masih banyaknya keluarga prasejahtera. Demikian pula halnya dengan ketersediaan fasilitas dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan sarana-prasarana. Fasilitas-fasilitas tersebut relatif masih sangat terbatas.

B. Program Pemberdayaan Masyarakat



Sumber: Diolah penulis, 2009.

Gambar 5.2 Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara

Program pemberdayaan masyarakat telah dilakukan oleh *change agent*, yaitu: pemerintah melalui program “Gerbang Dayaku”, perusahaan melalui program “Community of Development”, dan LSM melalui pro-

gram pendamping-an, penyuluhan dan penulisan. Gambar 5.2 memvisualisasikan secara ringkas program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh *change agent*.

1. Pemerintah: “Gerbang Dayaku”

Konsep pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada program yang diberi nama “Gerbang Dayaku”, atau Gerakan Pengembangan dan Pemberdayaan Kutai Kartanegara. Menurut situs resmi Kabupaten Kutai Kartanegara (<http://www.kutaiartanegara.com/gerbangdayaku/>), indikator pengukuran Program Gerbang Dayaku adalah peningkatan pendapatan, berkurangnya angka pengangguran dan tumbuhnya kemandirian masyarakat.

a. Percepatan Pembangunan Pedesaan

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya percepatan pembangunan pedesaan, mengalokasikan dana pembangunan pedesaan. Awalnya adalah sebesar 1 milyar per desa pada Tahun 2001, dan ditingkatkan menjadi 2 milyar per desa sejak tahun 2002. Fokus program terdapat pada 3 (tiga) bidang pengembangan, yaitu bidang Ekonomi Kerakyatan, Sumberdaya Manusia (SDM) dan Infrastruktur di pedesaan. Dari dana alokasi tersebut prosentase penggunaannya ditentukan, yaitu 35 persen untuk peningkatan ekonomi kerakyatan, 30 persen untuk peningkatan kualitas SDM dan 35 persen untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk mempercepat pembangunan di pedesaan Kutai Kartanegara.

Pemerintah Kabupaten melalui dinas-dinas teknis berperan sebagai “fasilitator” dan “asistensi” program. Proyek-proyek yang dulu terfokus di instansi-instansi tersebut sekarang diarahkan ke desa-desa, agar masyarakat desa lebih banyak berperan sehingga ada unsur pemberdayaan serta kemandirian masyarakat. Proses dan mekanisme pengucuran dana program pedesaan acuannya terdapat dalam “buku putih” yang telah mendapatkan pengesahan dari DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. “buku putih” tersebut berisi tentang rincian proyek, nilai proyek,

pelaksana dan target yang harus dicapai untuk setiap desa. “buku putih” ini merupakan produk hukum yang dapat diketahui oleh siapa saja. “buku putih” merupakan wujud transparansi kebijakan pembangunan sesuai prinsip-prinsip *good governance*. Dengan demikian, proyek-proyek yang dilaksanakan di 220 desa dapat dikontrol langsung oleh masyarakat dan *stakeholders* lainnya termasuk LSM, wartawan dan masyarakat dari luar daerah.

b. Pemberdayaan Usaha Kecil Pedesaan

Salah satu implementasi program Gerbang Dayaku adalah pembangunan ekonomi kerakyatan di pedesaan melalui sebuah program pemberdayaan ekonomi rakyat yang disebut “Program Pemberdayaan Usaha Kecil Pedesaan” yakni, sebuah program yang diluncurkan berupa pemberian pinjaman kredit dan pendampingan manajemen usaha kecil pedesaan untuk memberdayakan keluarga, kelompok dan masyarakat. Program ini diharapkan dapat menciptakan basis ekonomi kerakyatan yang tersebar di seluruh pelosok desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sumber pendanaan kredit berasal dari APBD Kutai Kartanegara yang dialokasikan melalui program pembangunan pedesaan sebesar Lima Ratus Juta Rupiah per desa yang merupakan bagian dari fokus pengembangan dan peningkatan ekonomi kerakyatan di pedesaan. Diharapkan melalui program ini akan mempercepat terciptanya masyarakat yang mandiri, dan pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Bentuk dari program ini adalah berupa pinjaman yang diberikan kepada perorangan/kelompok unit usaha kecil di pedesaan, sedangkan sifat dari program ini adalah merupakan “pinjaman tanpa bunga”, namun si peminjam tetap diwajibkan mengembalikan pinjaman dalam batas waktu yang telah ditentukan (maksimal 24 bulan).

c. Pemberian Subsidi Pendidikan

Pentingnya pendidikan disadari oleh Pemkab Kutai Kartanegara dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD Kutai Kartanegara. Aktualisasi dari pengalokasian anggaran pendidikan tersebut salah satunya

diwujudkan dalam pemberian “subsidi pendidikan”, antara lain subsidi pengganti SPP dan BP3 mulai SD hingga SMU (baik negeri maupun swasta) termasuk subsidi penyelenggaraan ujian akhir semester, subsidi penerimaan siswa baru, serta Bus antar jemput untuk siswa yang tinggalnya jauh dari sekolah. Selain itu, pemberian beasiswa kepada mahasiswa. Untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru, insentif diberikan sebesar Rp 750.000 per bulan bagi guru sekolah negeri dan swasta. Sementara para kepala sekolah diberi fasilitas sepeda motor gratis.

Tahun anggaran 2005 - 2008 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah memberikan subsidi pengganti SPP dan BP3 sebesar Rp 10.000 per siswa SD, Rp 20.000 per siswa SMP, dan Rp 25.000 per siswa SMU atau SMK. Bagi mereka yang melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi juga menerima subsidi melalui bagian sosial. Siswa yang melanjutkan ke tingkat D2 dan D3 memperoleh bantuan Rp 750.000 per tahun. Sementara untuk siswa S1, S2 dan S3 mendapat bantuan masing-masing Rp 1 juta dan Rp 5 juta per tahun.

d. Santunan Warga Tidak Mampu

Program Santunan Warga Tidak Mampu (SWTM) merupakan program Gerbang Dayaku yang dimulai sejak tahun 2001. Program SWTM berupa subsidi bagi warga miskin yang betul-betul miskin dan tidak produktif lagi, antara lain orang tua jompo miskin yang tidak memiliki sanak famili lagi untuk menjamin hidupnya, anak yatim piatu yang tidak memiliki keluarga, termasuk para penyandang cacat fisik yang tidak bisa bekerja. Santunan diberikan sebesar Rp. 100 ribu setiap bulan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Sedangkan bagi anak yatim piatu subsidi diberikan sampai yang bersangkutan bisa mandiri. Program SWTM merupakan wujud dari pelaksanaan UUD' 1945, bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Program kesejahteraan sosial dilakukan melalui pemberian SWTM. Pada tahun 2005 sampai dengan 2008, telah disalurkan bantuan

SWTM kepada 47,677 orang dengan dana sebesar Rp. 57.212.400.000,- Pada tahun 2006 sebanyak 15.550 orang dengan dana sebesar Rp. 18.660.000.000,- Sedangkan pada Tahun 2007 dan 2008, disalurkan kepada 7.370 orang dengan dana sebesar Rp. 8.844.000.000,-

Selain pemberian santunan kepada warga tidak mampu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atas persetujuan DPRD juga menjalankan program perbaikan rumah-rumah tua dan reot. Untuk keperluan itu, setiap desa mendapatkan jatah antara Rp.50 juta hingga Rp.100 juta. Sedangkan tiap rumah per tahunnya mendapatkan jatah antara Rp.1,5 juta sampai Rp.2 juta. Penentuan rumah yang akan diperbaiki ditentukan oleh aparat desa dan kecamatan. Penerima bantuan dikategorikan sebagai “warga miskin” dan tidak produktif lagi, antara lain; orang tua jompo, cacat fisik dan lanjut usia yang tidak memiliki sanak saudara dan famili lagi.

2. Perusahaan: *Community of Development*

Beberapa perusahaan besar memiliki daerah operasi di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya di Kecamatan Anggana, yaitu: Chevron Indonesia, TAC Pertamina-Medco E&P Indonesia, Total E&P Indonesia, dan VICO Indonesia. Perusahaan-perusahaan besar ini, tergabung dalam BPMIGAS-KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja *Sharing*) menjalankan kegiatan *Community Development* (Comdev) untuk menjalankan tanggungjawabnya terhadap masyarakat dalam *Community Social Responsibility* (CSR).

Berdasarkan Laporan Comdev BPMIGAS-KKKS Wilayah Kaltim Tahun 2007, BPMIGAS-KKKS Wilayah Kaltim telah melaksanakan 219 program Pengembangan Masyarakat dan program Hubungan Masyarakat senilai Rp 15,9 milyar. Semua program yang telah dikerjakan sepanjang tahun 2007, meliputi wilayah Kecamatan Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Muara Jawa, dan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Nilai keseluruhan program pengembangan masyarakat dan program hubungan masyarakat yang diserahkan mencapai Rp 15.965.094.644 dengan rincian masing-masing Chevron Indonesia

sebesar Rp 2.679.274.790, TAC Pertamina-Medco E&P Indonesia sebesar Rp 870.721.533, Total E&P Indonesia sebesar Rp 9.179.944.501, dan VICO Indonesia sebesar Rp 3.235.153.820.

Bantuan dari Total E&P Indonesia diserahkan dalam sektor pendidikan seperti rehabilitasi sekolah. Sektor kesehatan seperti pengobatan massal dan pembangunan sarana air bersih, perbaikan gizi dan lainnya. Bantuan itu juga digunakan untuk pembangunan rumah ibadah, genset, semenisasi gang, dan lainnya. Sedangkan VICO Indonesia menyerahkan bantuan dalam bentuk kegiatan seperti renovasi masjid, pemberian bubuk abate, pengembangan kelompok tani dan tiga kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing kecamatan di Muara Badak, Marangkayu, Muara Jawa dan Samboja.

Tahun 2008, BP Migas wilayah Kaltim dan KKKS kembali melaksanakan Program Pembangunan Masyarakat senilai Rp 16,6 miliar, yang dananya berasal dari bantuan Chevron Indonesia, Total E&P Indonesia dan Vico Indonesia. Total E&P Indonesia memberikan bantuan sebesar Rp 10,6 miliar untuk 97 program pengembangan masyarakat dan Rp 1,076 miliar untuk 60 program hubungan kemasyarakatan. Program pengembangan masyarakat berupa

Sementara itu, Vico Indonesia menyerahkan bantuan sekitar Rp 2,008 miliar untuk 59 kegiatan sosial pendukung operasi. Dan terakhir, bantuan TAC Pertamina-Medco E&P Indonesia sebesar Rp 1,2 miliar juga diberikan untuk 7 kegiatan hubungan masyarakat seperti riset, kegiatan dan lainnya.

Program-program yang diserahkan kepada masyarakat terdiri dari berbagai sektor. Di bidang pendidikan, dengan dana dan pendampingan dari BPMIGAS-KKKS, masyarakat telah membangun dan merehabilitasi sekolah serta menyelenggarakan berbagai pelatihan. Di bidang kesehatan, masyarakat dan BPMIGAS-KKKS bergandengan tangan melaksanakan pengobatan massal, pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, program perbaikan gizi dan kesehatan mata masyarakat. Di bidang ekonomi, telah diselenggarakan berbagai pelatihan di bidang peternakan, pertanian, dan perikanan serta pengembangan

industri rumah tangga. Sementara di sektor pengembangan prasarana, masyarakat telah membangun/ merenovasi mesjid, gereja, jembatan, dan lain sebagainya.

BPMIGAS-KKKS meyakini bahwa hubungan sinergi dan harmonis dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat tercipta, dipertahankan, dan dikembangkan secara terus menerus, bila masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan dapat merasakan perubahan positif karena kegiatan usaha hulu migas di sekitar kehidupannya. Oleh karena itu, BPMIGAS-KKKS telah bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pengembangan masyarakat. Proyek-proyek yang diserahkan ini di klaim oleh KKKS sebagai proyek yang sepenuhnya dikelola sendiri oleh masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasinya sehingga dapat menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program tersebut dan menjamin terciptanya pelaksanaan program yang berkesinambungan

3. LSM: Pendampingan, Penyuluhan dan Penulisan

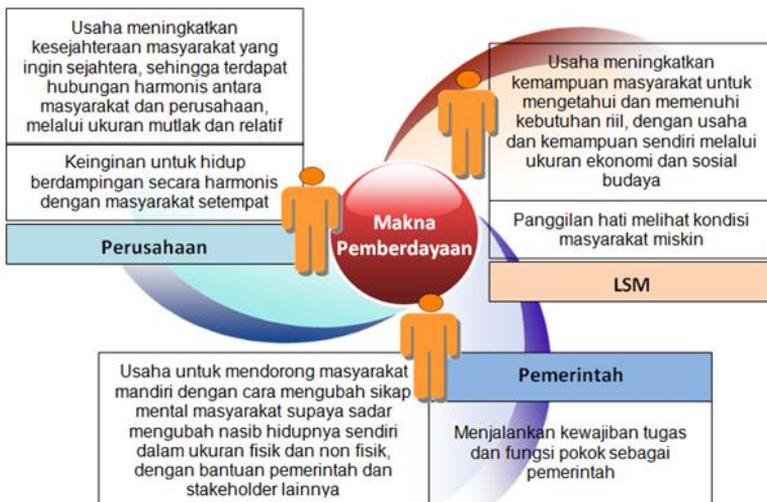
LSM Bina Masyarakat Mandiri (LSM BBM) didirikan pada Tahun 1999 sejak otonomi daerah mulai digulirkan oleh pemerintah pusat. Pendirian LSM BMM digagas oleh beberapa orang kelahiran Kecamatan Anggana yang prihatin melihat kondisi masyarakat, sementara banyak perusahaan-perusahaan besar beroperasi di Kecamatan ini. Beberapa orang yang berpendidikan cukup tinggi ini sepakat untuk membentuk sebuah LSM yang awalnya hanya memediasi jika ada pertentangan atau konflik antara perusahaan dan masyarakat. LSM ini aktif dengan kegiatan pemberdayaan di Kecamatan Anggana yang fokus pada kegiatan pendampingan. Beberapa program pendampingan yang telah dilakukan LSM BMM adalah; pendampingan Program Kredit Usaha Kecil Pedesaan (PPUKP), pendampingan usaha mikro dan kecil, Bengkel usaha mikro dan kecil, pelatihan dan pendampingan manajemen usaha kecil. Semua program pendampingan dilakukan di Kecamatan Anggana.

Lembaga Fokus Survey Kalimantan Timur (LFSKT) adalah sebuah lembaga riset di Kaltim yang telah berkiprah dan berkontribusi pada pembangunan di Kaltim. LFSKT berkecimpung dalam penulisan dan pendampingan pemberdayaan sebagai tindak lanjut hasil penulisannya. Penulisan yang telah dilakukan meliputi riset sosial (pemetaan sosial kemasyarakatan), riset politik dan riset sosial. Keprihatinan pada minimnya data-data survey terkait dengan masalah-masalah sosial, politik dan ekonomi di Kaltim menjadi salah satu motivasi keinginan mendirikan sebuah lembaga yang berbasis survey. PT Vico Indonesia merupakan perusahaan yang pertama kali menggunakan jasa Lembaga Kaltim Equal. LFSKT dipercaya melaksanakan pemetaan sosial dan kebutuhan masyarakat Kutai Kartanegara dalam periode tiga tahun. Selain juga melakukan survei-survei dan kajian-kajian pembangunan baik untuk keperluan sendiri maupun untuk kepentingan publik.

SUARA STAKEHOLDER PEMBERDAYAAN

Memahami orang lain tidak harus berarti menyetujui pendapatnya. Memahami orang lain berarti mampu untuk melihat sesuatu dengan mata hati, fikiran dan semangat orang lain. (Stephen R Covey, 2004, 197-198)

A. Makna dan Tujuan Pemberdayaan Menurut Change Agent



Sumber: Diolah dari Hasil Wawancara, 2009

Gambar 6.1 Makna dan Motivasi Melaksanakan Pemberdayaan Menurut *Change Agent*

Hasil wawancara menyebutkan bahwa makna pemberdayaan menurut pelaku perubahan (*Change agent*) cenderung berbeda. Meski ada yang sama, namun pada sisi-sisi tertentu berbeda. Beberapa persamaan dan perbedaan itu dapat

dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek motivasi pelaku pemberdayaan, pelaku utama, ukuran keberhasilan pemberdayaan, dan klasifikasi posisi (kondisi awal) masyarakat, sehingga akan menggiring penulis pada dugaan terbaik tentang makna pemberdayaan menurut *change agent*.

Gambar 6.1 memvisualisasikan perbedaan dan persamaan makna dan motivasi melaksanakan pemberdayaan pada masing-masing *change agent*. Selanjutnya, penggambaran tentang pelaku utama dan tujuan pemberdayaan serta klasifikasi (kluster) masyarakat sasaran pemberdayaan (*target group*) menurut *change agent*, divisualisasikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Pelaku Utama dan Tujuan Pemberdayaan Menurut *Change agent*

<i>Change agent</i>	Urutan Pelaku Utama Pemberdayaan	Tujuan Pemberdayaan	Klasifikasi Posisi Masyarakat
Pemerintah	1. Masyarakat 2. Pemerintah 3. Stakeholder Lainnya	Peningkatan kesejahteraan: <ul style="list-style-type: none"> Ukuran Fisik (pendapatan, kepemilikan aset dsb), ukuran Non Fisik (pulang kampung, kenduri dsb) 	<ul style="list-style-type: none"> Golongan Darat Golongan Laut
Perusahaan	1. Pemerintah 2. Masyarakat 3. Perusahaan 4. Stakeholder Lainnya	Peningkatan kesejahteraan: <ul style="list-style-type: none"> Ukuran Mutlak (pendapatan, kepemilikan aset), Ukuran Relatif (Kesehatan, dan pendidikan dsb) 	<ul style="list-style-type: none"> Golongan Pancing Golongan Ikan
LSM	1. Pemerintah 2. Masyarakat 3. Perusahaan 4. Stakeholder Lainnya	Peningkatan kesejahteraan: <ul style="list-style-type: none"> Indikator Ekonomi (pendapatan, aset dsb) Indikator Sosial dan budaya (perubahan perilaku masyarakat) 	<ul style="list-style-type: none"> Golongan Akar Golongan Dahan Golongan Ranting

Sumber: Diolah dari Hasil Wawancara, 2009

Berdasarkan uraian tentang makna pemberdayaan yang dikemukakan *change agent*, maka pemberdayaan memiliki makna; usaha untuk menumbuhkan ke-mandirian masyarakat agar mau dan mampu mengubah nasibnya sendiri menjadi lebih sejahtera secara ekonomi, sosial dan budaya, serta berkelanjutan. Makna

pemberdayaan ini mengandung beberapa unsur sebagai berikut:

1) Pra Kondisi Pemberdayaan

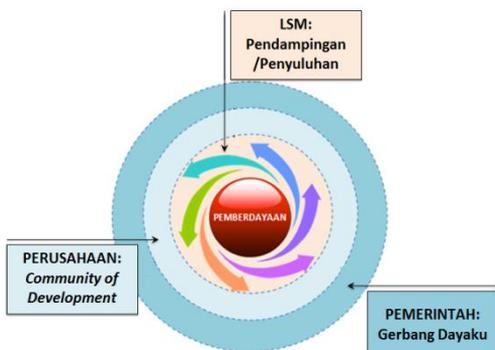


Sumber: Diolah Penulis, 2009
 Gambar 6.2 Pra Kondisi Pemberdayaan

Pemberdayaan harus dimulai dari pengkondisian pra pemberdayaan yaitu berupa niat dan keinginan masyarakat untuk berubah. Keinginan untuk lebih sejahtera harus muncul dari dalam hati dan

fikiran masyarakat. Selama niat masyarakat belum ada, maka pemberdayaan tidak akan berjalan efektif. Sementara hati dan pikiran digunakan sebagai dasar untuk program pemberdayaan menjadi berjalan alamiah dan dapat menyentuh aspek-aspek sosial budaya, disamping aspek ekonomi. Semakin tinggi niat dan motivasi, semakin tahu klasifikasi posisi awal masyarakat, serta semakin tahu masyarakat dengan kebutuhannya, maka akan semakin siap program pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan.

2) Sinergi *Change Agent*



Sumber: Diolah Penulis, 2009
 Gambar 6.3 Sinergistas antar *Change Agent*

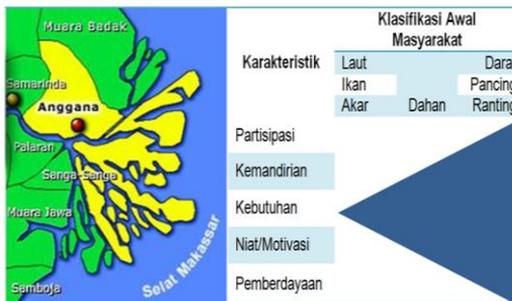
Pelaku perubahan atau *change agent*) harus mampu bersinergi melaksanakan pemberdayaan dengan peran dan fungsinya. Pemerintah lebih dominan mengambil peran pada posisi “ranting” dalam bentuk bantuan-

bantuan stimulan. LSM dan *stakeholder* lainnya dominan

melaksanakan pemberdayaan pada posisi akar, berupa pendampingan dan penyuluhan. Sementara perusahaan berperan lebih dominan pada dahan pemberdayaan dengan program-program comdev-nya.

Pemerintah sebagai koordinator pemberdayaan dapat menjadi “alas atau dasar” dari semua proses pemberdayaan melalui Gerbang Dayaku. Program Gerbang Dayaku diarahkan dan didesain menjadi sebuah program yang memberi peluang bagi *stake-holder* lainnya untuk berperan maksimal pada lapisan tertentu. Artinya Gerbang Dayaku harus menyentuh semua lapisan pemberdayaan, yaitu ranting, dahan, dan akar. Perusahaan dapat lebih optimal untuk menyentuh lapisan “dahan” pemberdayaan melalui program-program comdev-nya. Sementara LSM dan individu dapat berperan pada lapisan “akar” dengan program-program pendampingan dan penyuluhan.

3) Klasifikasi Posisi (Kondisi Awal) Masyarakat



Sumber: Diolah Penulis, 2009

Gambar 6.4 Kondisi Awal dan Karakteristik Masyarakat Kecamatan Anggana

Kondisi awal masyarakat memegang peranan penting dalam pra kondisi pemberdayaan. Kondisi posisi masyarakat menunjukkan tingkat kesiapan masyarakat sebagai tar-

get pemberdayaan. Di sisi lain kondisi awal masyarakat akan menentukan program dan pendekatan yang tepat bagi pelaku pemberdayaan. Umumnya kondisi awal masyarakat pesisir di Kecamatan Anggana terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok masyarakat yang tinggal di darat (kelompok pancing atau kelompok ranting), dan kelompok masyarakat yang tinggal di laut (kelompok ikan atau kelompok akar).

Ciri-ciri kelompok pancing adalah lebih partisipatif, lebih

mandiri, dan lebih tahu dengan kebutuhannya sendiri. Di samping itu kelompok pancing biasanya mudah dimotivasi dan distimulan sehingga biasanya kelompok ini tahu cara untuk mengangkat taraf kehidupannya untuk menjadi lebih baik. Namun, kelompok pancing cenderung lebih individualistis dan saling menjatuhkan satu sama lainnya, serta jarang mau menerima keberhasilan orang lain. Sedangkan kelompok ikan biasanya kurang partisipatif, kurang mandiri, dan cenderung tidak tahu dengan kebutuhannya sendiri. Kelompok ikan biasanya lebih sulit dimotivasi dan distimulan sehingga biasanya kelompok ini tidak tahu cara untuk mengangkat taraf kehidupannya untuk menjadi lebih baik. Namun, kelompok ikan cenderung lebih sosial sehingga situasi saling tolong menolong lebih kental di kelompok ini.

B. Program dan Pendekatan Pemberdayaan oleh Change Agent

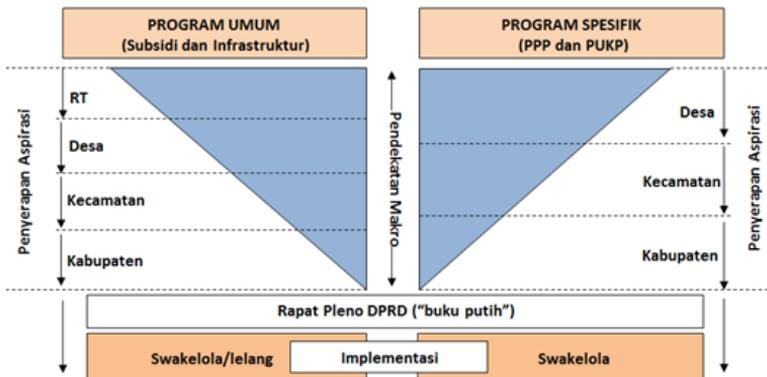
Program dan pendekatan pemberdayaan pada setiap *change agent*, umumnya memiliki kekhasan masing-masing. Terkait dengan hal ini, sub bab ini akan membahas program dan pendekatan pemberdayaan yang digunakan oleh *change agent*, yaitu pemerintah dan *stakeholders* lainnya, di Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun, pembahasan akan tetap dikaitkan dengan klasifikasi atau kluster posisi awal masyarakat, yang sudah diidentifikasi dalam pembahasan sebelumnya di Kecamatan Anggana.

1. Pemerintah: Fisik dan Makro

Gambar 6.5 memberikan gambaran bahwa hampir di semua tahapan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah, kurang memberikan peluang partisipasi masyarakat. Meski roh Gerbang Dayaku adalah partisipasi masyarakat dalam koridor kemandirian, namun implementasinya di lapangan tidak menunjukkan hal demikian. Musrenbang cenderung hanya dijadikan sebagai justifikasi dan

legitimasi bahwa program sudah merupakan serapan dari aspirasi masyarakat.

Prinsip keterwakilan golongan seperti pemuda, perempuan, tokoh masyarakat hanya terjadi pada saat musrenbang, tapi saat pemutusan program dalam “buku putih”, muncul banyak kepentingan. Terdapat distorsi yang besar pada saat rekomendasi yang dikeluarkan oleh musrenbang berada pada tingkat kabupaten. Distorsi semakin besar saat proses penentuan palu dalam sidang paripurna DPRD. Sehingga tidak aneh, program-program dalam “buku putih” sangat berbeda dengan rekomendasi musrenbang.



Keterangan:

Subsidi : Subsidi Pendidikan dan Kesehatan, ZBPA, SWTM

PPP : Percepatan Pembangunan Pedesaan

PUKP : Pemberdayaan Usaha Kecil Pedesaan

Sumber: Diolah penulis, 2009.

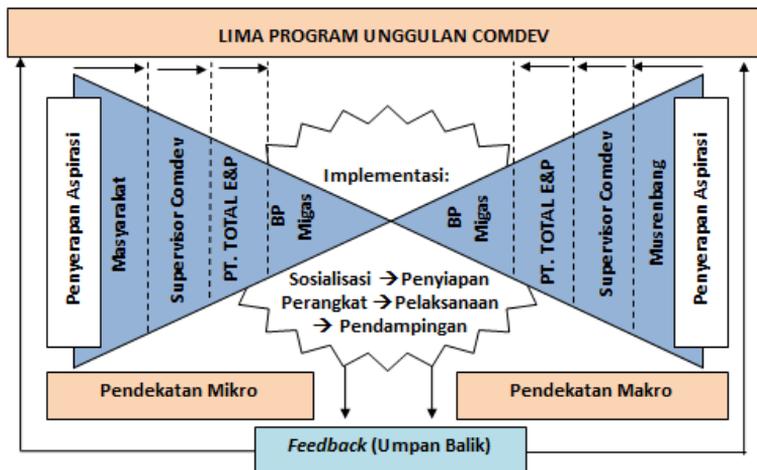
Gambar 6.5 Alur Implementasi Program dan Pendekatan Pemberdayaan Pemerintah

Saat pelaksanaan, serupa dengan penerapan aspirasi, hampir semua program kurang memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Sebagian besar program dilaksanakan secara swakelola dan lelang. Alasannya adalah untuk mematuhi Keppres 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Evaluasi program pemberdayaan

juga tidak melibatkan masyarakat, mengingat evaluasi program hanya dilakukan oleh lembaga pengawasan pemerintah daerah yaitu Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Fokus utama evaluasi hanya untuk memeriksa administrasi dan fisik kegiatan, misalnya berapa jumlahnya, sudah tepat sasaran atau belum, proses penyalurannya sudah sesuai aturan atau tidak. Intinya, proses evaluasi yang dilakukan adalah proses evaluasi administrasi. Proses evaluasi sama sekali tidak menyentuh aspek manfaat dan umpan balik dari masyarakat.

2. Perusahaan: Kombinasi Makro dan Mikro

Terdapat lima fokus program andalan CSR dari PT Total E&P Indonesia, yakni pendidikan dan penulisan, kesehatan dan nutrisi, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, lingkungan dan alternatif energi, serta program pelestarian kebudayaan lokal.



Sumber: Diolah penulis, 2009.

Gambar 6.6 Alur Implementasi Program dan Pendekatan Pemberdayaan Perusahaan

Comdev PT. Total E&P Indonesia saat ini sedang membuat *mapping* desa unggulan, yang sesuai dengan lima bidang program unggulan comdev. Desa unggulan adalah desa

yang telah berhasil memunculkan kekhasan dan keunggulannya di salah satu bidang comdev. Peta desa unggulan ini akan memudahkan comdev untuk memilih dan menentukan program prioritas yang diusulkan dari aspirasi masyarakat untuk diluncurkan. Artinya, peta desa unggulan dapat menjadi umpan balik.

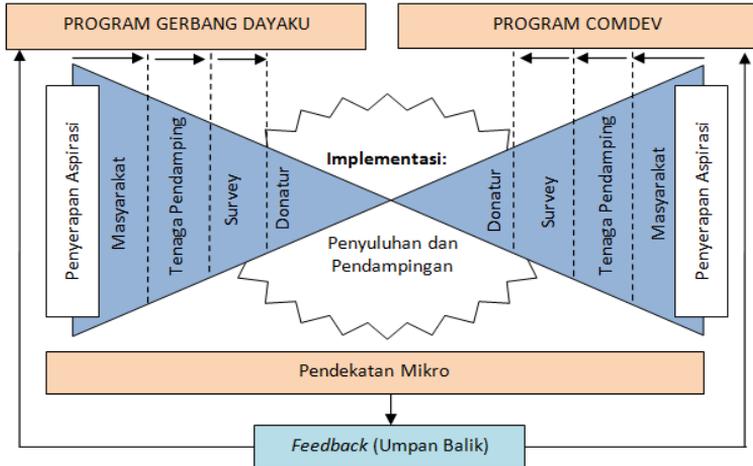
Tindak lanjut dari peluncuran program adalah sosialisasi dan pelatihan. Jika semua kelengkapan program, baik masyarakat (person), maupun kelengkapan administrasi telah lengkap, baru masyarakat melakukan pekerjaan. Pelaksanaan pekerjaan juga tetap dilakukan pendampingan oleh supervisor comdev.

3. LSM: Mikro dan Sosial Budaya

Program pemberdayaan LSM tidak dilakukan secara kontinyu dan hanya bersifat temporer. Sebagian besar program LSM adalah jika ada kerjasama dengan pihak pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang banyak tersebar di Kecamatan Anggana. Program pemberdayaan LSM fokus pada pendampingan dan penyuluhan, serta penulisan. Akibatnya, program pemberdayaanpun lebih banyak pada aspek sosial budaya masyarakat. Penyusunan program dilakukan dengan memperhatikan program-program yang diluncurkan oleh pemerintah melalui Gerbang Dayaku, dan atau oleh perusahaan melalui comdev. Selanjutnya akan dilakukan survey kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat prioritas dan kebutuhan riil masyarakat.

Program terpilih akan dibuatkan proposalnya, selanjutnya akan ditawarkan kepada pemerintah dan perusahaan. Penawaran kepada pemerintah biasanya di bawah proyek SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) Kabupaten Kutai Kartanegara. Jika program pendampingan, pelatihan dan penulisan disetujui pihak penyandang dana, maka program dapat diluncurkan kepada masyarakat. Meski terdapat kerjasama dengan pemerintah dan perusahaan,

namun sistem dan mekanisme kerja mengikuti standar kerja yang sudah ditetapkan LSM.



Sumber: Diolah penulis, 2009

Gambar 6.7 Alur Implementasi Program dan Pendekatan Pemberdayaan LSM

Standard kerja LSM dalam kegiatan pendampingan dilakukan sepanjang waktu, dengan merekrut relawan-relawan dari pemuda desa setempat, dan dilatih untuk melaksanakan pendampingan, disesuaikan dengan bidang pendampingan yang dilakukan. Sedangkan standard penulisan yang dilakukan oleh LSM adalah penulisan dengan menggunakan data primer (pendekatan mikro). Evaluasi program dilakukan setelah program pelatihan dan penulisan selesai dilakukan. Sedangkan pendampingan dilakukan secara berkala, biasanya enam bulan sekali. Evaluasi program menyangkut semua aspek, dengan instrumen kuesioner yang sudah dibuat LSM. Instrumen evaluasi lebih banyak mengarah kepada penilaian persepsi masyarakat, yang dipadukan dengan penilaian subyektif enumerator.

Berdasarkan atas gambaran pemberdayaan yang dilakukan ketiga *change agent* di atas, maka ilustrasi awal untuk

memudahkan pembahasan program dan pendekatan pemberdayaan versi *change agent* adalah seperti terlihat pada Gambar 6.8.



Sumber: Diolah Penulis, 2009.

Gambar 6.8 Program dan Pendekatan Pemberdayaan *Change Agent*

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa program comdev dan LSM lebih dapat diterima oleh masyarakat dibandingkan program Gerbang Dayaku yang dibuat oleh pemerintah. Terdapat tiga penyebab program comdev dan LSM lebih diterima dibandingkan Program Gerbang Dayaku, yaitu; a) Program comdev dan LSM lebih meng-

aspirasi kebutuhan dan keinginan masyarakat, b) Pendekatan yang digunakan pada program comdev dan LSM adalah pendekatan mikro, c) Penggunaan umpan balik (*feed back*) dalam penentuan program comdev dan LSM selanjutnya.

C. Makna Pemberdayaan menurut Target Group: Pemberian Peluang Berpartisipasi

Pemberdayaan yang dilakukan *change agent* dipandang masyarakat golongan pancing hampir identik dengan bantuan. Seperti yang dikatakan oleh S yang menyebut pemberdayaan, selalu dengan istilah “bantuan”. Makna pemberdayaan sebagai bantuan, membuat pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM menjadi tidak tersebut oleh masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi mengingat LSM bergerak pada bidang pendampingan dan penyuluhan (non fisik), sementara pemerintah dan perusahaan lebih banyak bergerak di bidang fisik.

Makna pemberdayaan bagi masyarakat pancing adalah: bantuan secara adil dan merata yang dapat bermanfaat dan dibarengi

dengan adanya peluang partisipasi masyarakat. Sedangkan motivasi untuk mengubah usaha menjadi lebih baik adalah ingin hidup sejahtera. Makna pemberdayaan ini dapat dimaklumi mengingat masyarakat golongan pancing pada dasarnya adalah golongan masyarakat yang sudah memiliki modal dasar untuk diberdayakan. Masyarakat golongan pancing biasanya lebih partisipatif, lebih mandiri, lebih mudah diajak bekerjasama. Umumnya masyarakat golongan pancing sudah memiliki pranata sosial yang lebih baik, karena tinggal sudah cukup lama dan membaur dengan beragam etnis di Kecamatan Anggana



Sumber: Hasil Wawancara Diolah, 2009.

Tabel 6.9 Makna dan Motivasi Melaksanakan Pemberdayaan menurut *Target Group*

Pandangan masyarakat kelompok ikan, sementara itu, sehari-hari cenderung sama, mereka hanya melihat tingkat kehidupan yang sama miskin dengan diri mereka. Akibatnya motivasi untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik menjadi rendah.

Inilah yang membuat

makna pemberdayaan bagi masyarakat golongan ikan hanyalah “Pemberian peluang untuk hidup secara mandiri tanpa tergantung pada orang lain”. Hidup mandiri bagi mereka lebih pada definisi non fisik, yaitu bisa mengambil keputusan untuk kehidupan dirinya sendiri.

Kebutuhan fisik, hanya berupa pemenuhan kebutuhan sandang pangan secara sederhana. Seperti yang diungkapkan salah satu informan kunci, bahwa: “bisa makan, menyekolahkan anak dan memiliki sedikit simpanan jika ada anggota keluarga yang sakit, di samping itu, bisa pulang kampung setahun sekali, di saat Hari Raya ledul Fitri. Aspek terpenting dalam pemberdayaan menurut masyarakat golongan ikan adalah bagaimana membuat mereka tidak tergantung dengan pihak lain, sesuai dengan

falsafah hidupnya yang menyebutkan “tangan di atas, selalu lebih baik daripada tangan di bawah”.

D. Partisipasi dan Tanggapan Target Group terhadap Program dan Implementasi Pemberdayaan

Partisipasi adalah bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (intrinsik) maupun dari luar dirinya (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian, sejak dari awal, proses dan perumusan hasil. Keterlibatan masyarakat akan menjadi penjamin bagi suatu proses yang baik dan benar.

Indikator yang dipakai untuk mengungkapkan pelaksanaan program-program dan tujuan pemberdayaan yang dilakukan *change agent* masyarakat mencakup: a) Ketertarikan masyarakat dalam program, b) Frekuensi kehadiran masyarakat pada pelaksanaan program, c) Peluang penyampaian usulan oleh masyarakat, d) Jumlah dan jenis usulan yang dikemukakan oleh masyarakat, e) Jumlah dana yang dapat digali dari masyarakat untuk pelaksanaan program, f) Intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah, g) Penilaian secara keseluruhan program pemberdayaan, dan h) Keberlanjutan program pemberdayaan.

Responden yang diminta pendapat berasal dari masyarakat *target group* berjumlah 12 orang (n=12)

a) Ketertarikan dan Kehadiran Masyarakat dalam Program.

Pertanyaan pertama yang diajukan adalah: “Menurut pengamatan saudara, seberapa besar ketertarikan masyarakat dalam mengikuti setiap program pemberdayaan?”. Sedangkan pertanyaan kedua yang diajukan adalah: “Menurut pengamatan saudara, seberapa sering dan seberapa banyak

frekuensi kehadiran masyarakat dalam mengikuti setiap pelaksanaan program pemberdayaan?”.

Tanggapan masyarakat sasaran atas program dan tujuan pemberdayaan pada masing-masing *change agent* menunjukkan bahwa *target group* lebih banyak tertarik pada program pemberdayaan comdev dan LSM dibandingkan dengan Program Gerbang Dayaku. Demikian juga halnya dengan jumlah frekuensi kehadiran masyarakat. Program pemberdayaan comdev dan LSM lebih banyak dan lebih sering dihadiri masyarakat sasaran dibandingkan program Gerbang Dayaku.

b) Peluang Penyampaian Usulan Program oleh Masyarakat.

Pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah: “Bagaimana peluang untuk menyampaikan ide atau usulan masyarakat pada setiap pelaksanaan program pemberdayaan?”. Jawabannya adalah: program-program comdev dan LSM dipandang masyarakat sasaran lebih banyak memberikan peluang kepada masyarakat dalam penyampaian ide dan usulan dibandingkan program Gerbang Dayaku yang dilaksanakan pemerintah.

c) Jumlah dan Jenis Usulan Program yang Dikemukakan Oleh Masyarakat.

Pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah: “Seberapa banyak masyarakat telah menyampaikan ide atau usulan masyarakat pada setiap pelaksanaan program pemberdayaan, baik dari sudut jumlah maupun jenis usulan?”. Jawaban responden adalah: Masyarakat sasaran memandang bahwa masyarakat lebih banyak memberikan ide dan usulan kepada Program-program comdev dan LSM dibanding program pemberdayaan pada Program Gerbang Dayaku.

d) Partisipasi Dana yang Digali dari Masyarakat untuk Pelaksanaan Program.

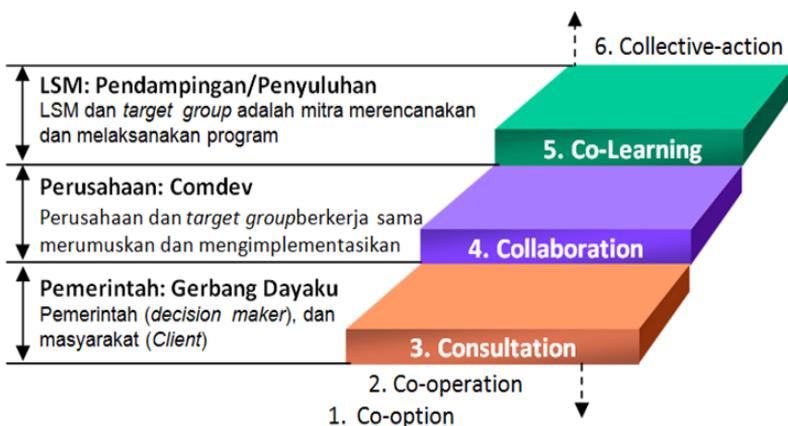
Pertanyaan yang diajukan adalah: “seberapa banyak dana yang dapat digali dari masyarakat untuk mendukung program pemberdayaan yang dilakukan oleh pelaku pemberdayaan?”. Jawaban responden menyebutkan bahwa program comdev

lebih banyak menyerap dana yang digali dari masyarakat dibandingkan program Gerbang Dayaku dan LSM. Jawaban responden ini mencerminkan bahwa program comdev lebih banyak memperoleh partisipasi masyarakat daripada program Gerbang Dayaku dan LSM, dari aspek penggalan dana masyarakat.

- e) Intensitas Kegiatan Petugas dalam Pengendalian Masalah.
Pertanyaan yang diajukan untuk intensitas kegiatan adalah: “Seberapa sering petugas melakukan kegiatan ketika terjadi masalah dalam pelaksanaan program pemberdayaan?”. Jawaban responden adalah program comdev dan LSM memiliki intensitas kegiatan petugas yang lebih tinggi dalam pengendalian masalah, jika dibandingkan dengan program Gerbang Dayaku. Jawaban responden ini memiliki makna bahwa program Gerbang Dayaku tidak menyiapkan petugas pendamping jika terdapat masalah yang muncul. Berbeda dengan program comdev dan program LSM yang memang memiliki supervisor untuk program comdev dan pendamping untuk program LSM.
- f) Penilaian Keseluruhan Program Pemberdayaan.
Pertanyaan yang diajukan terkait dengan keseluruhan program pemberdayaan yang dibuat *change agent*, adalah: “Jika saudara diminta untuk menilai seluruh program pemberdayaan, seberapa bagus program-program pemberdayaan itu menurut saudara?”. Jawaban responden menyebutkan bahwa program-program pemberdayaan yang dibuat oleh perusahaan (Comdev) dan LSM jauh lebih bagus dibandingkan program-program pemberdayaan yang dibuat oleh pemerintah (Gerbang Dayaku). Penilaian responden ini mencakup semua proses pemberdayaan, mulai dari perencanaan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program, yang dikaitkan dengan partisipasi masyarakat.
- g) Kemungkinan Keberhasilan Program Pemberdayaan.
Pertanyaan tentang keberlanjutan program adalah: “Jika saudara diminta untuk meramal kemungkinan keberhasilan semua program pemberdayaan untuk menciptakan

kemandirian masyarakat, apa ramalan anda?”. Jawaban responden berbeda untuk setiap *change agent*. Untuk program pemberdayaan yang dibuat pemerintah melalui Gerbang Dayaku, sebagian besar masyarakat responden menilai tidak mungkin atau mustahil. Sementara untuk program comdev dan LSM penilaian sebaliknya diberikan oleh mayoritas masyarakat, yaitu mungkin. Penilaian masyarakat ini memberikan indikasi bahwa program-program pemberdayaan yang dibuat oleh comdev dan LSM masih lebih baik dibandingkan program-program pemberdayaan yang dibuat pemerintah melalui program Gerbang Dayaku.

Berdasarkan hasil jawaban-jawaban yang diberikan informan, maka kuat dugaan bahwa tanggapan dan partisipasi *target group* terhadap program dan implementasi program pemberdayaan pada masing-masing *change agent* adalah berbeda. Partisipasi masyarakat cenderung lebih tinggi pada program-program yang dibuat oleh perusahaan dan LSM. Sedangkan partisipasi masyarakat untuk program yang dibuat pemerintah dalam program Gerbang Dayaku, cenderung lebih rendah.



Sumber: Diolah dari Hasil Kuesioner, 2009

Gambar 6.9 Tingkat Partisipasi Masyarakat Target terhadap Program dan Implementasi Pemberdayaan *Change Agent*

Gambar 6.10 mengilustrasikan tingkat partisipasi masyarakat dalam program dan implementasi program pemberdayaan yang dibuat *change agent*. Jika ukuran bentuk dan tipe partisipasi menurut Syahyuti (2006) digunakan, maka kuat dugaan bahwa bentuk partisipasi masyarakat target pada program pemberdayaan Gerbang Dayaku berada pada tingkatan *consultation*. Sedangkan pada program comdev yang dilakukan perusahaan, berada pada tingkatan *collaboration*. Sementara itu program pemberdayaan pendampingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh LSM, telah masuk pada tingkatan *co-learning*.

Program com-dev dan LSM lebih menginspirasi kebutuhan dan keinginan masyarakat, sedangkan pada program Gerbang Dayaku, secara riil sesungguhnya mengabaikan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat pada program pemberdayaan Gerbang Dayaku berada pada tingkat konsultasi (*consultation*), di mana memang masyarakat diminta menyampaikan aspirasinya, namun aspirasi masyarakat ini hanya dijadikan sumber informasi untuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat hanya sebatas pasien atau klien (*client*), yang tidak memiliki kewenangan untuk ikut memutuskan program pemberdayaan untuk dirinya sendiri.

Tingkat partisipasi masyarakat pada program comdev yang dibuat perusahaan berada pada tingkat kolaborasi (*collaboration*). Tanggapan masyarakat ini diperoleh karena dalam program dan implementasinya masyarakat sasaran dan perusahaan bersama-sama merumuskan program dan implementasinya. Meski keputusan tetap berada pada perusahaan, tetapi program yang disetujui adalah program yang memang sudah diusulkan oleh masyarakat bersama-sama dengan supervisor comdev. Pertimbangan perusahaan untuk menyetujui program semata hanya karena pertimbangan dana, dan skala prioritas pengembangan masyarakat yang sudah dipetakan sebelumnya. Program dan implementasi program pemberdayaan perusahaan melalui comdev ini telah menempatkan masyarakat sebagai kolaborator, sehingga partisipasi masyarakat telah lebih tinggi dibanding partisipasi masyarakat pada Program Gerbang Dayaku.

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap program dan implementasi program LSM telah berada pada posisi *co-learning*. Dugaan ini menjadi kuat ketika LSM dipandang telah menempatkan masyarakat sebagai partner dalam melaksanakan program pemberdayaannya. Sebagai partner, LSM sebagai *change agent* bersama-sama dengan masyarakat target saling membagi pengetahuannya, memperoleh saling pengertian, dan bekerjasama untuk merencanakan program.

Penilaian masyarakat yang lebih memilih program comdev dan LSM lebih baik daripada program Gerbang Dayaku, disebabkan oleh tiga faktor, yang salah satunya adalah perbedaan dalam aspirasi masyarakat. Program comdev dan LSM lebih mengaspirasi kebutuhan dan keinginan masyarakat, sedangkan pada program Gerbang Dayaku, secara riil sesungguhnya mengabaikan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat pada program pemberdayaan Gerbang Dayaku berada pada tingkat konsultasi (*consultation*), di mana memang masyarakat diminta menyampaikan aspirasinya, namun aspirasi masyarakat ini hanya dijadikan sumber informasi untuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat hanya sebatas pasien atau klien (*client*), yang tidak memiliki kewenangan untuk ikut memutuskan program pemberdayaan untuk dirinya sendiri.

Tingkat partisipasi masyarakat pada program comdev yang dibuat perusahaan berada pada tingkat kolaborasi (*collaboration*). Tanggapan masyarakat ini diperoleh karena dalam program dan implementasinya masyarakat sasaran dan perusahaan bersama-sama merumuskan program dan implementasinya. Meski keputusan tetap berada pada perusahaan, tetapi program yang disetujui adalah program yang memang sudah diusulkan oleh masyarakat bersama-sama dengan supervisor comdev. Pertimbangan perusahaan untuk menyetujui program semata hanya karena pertimbangan dana, dan skala prioritas pengembangan masyarakat yang sudah dipetakan sebelumnya. Program dan implementasi program pemberdayaan perusahaan melalui comdev ini telah menempatkan masyarakat sebagai

kolaborator, sehingga partisipasi masyarakat telah lebih tinggi dibanding partisipasi masyarakat pada Program Gerbang Dayaku.

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap program dan implementasi program LSM telah berada pada posisi *co-learning*. Dugaan ini menjadi kuat ketika LSM dipandang telah menempatkan masyarakat sebagai partner dalam melaksanakan program pemberdayaannya. Sebagai partner, LSM sebagai *change of agent* bersama-sama dengan masyarakat target saling membagi pengetahuannya, memperoleh saling pengertian, dan bekerjasama untuk merencanakan program.

Pemberdayaan pada dasarnya adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan *stakeholders* lainnya. Seharusnya, masyarakat selain menjadi sasaran (*target group*) juga sekaligus pelaku pembangunan. Keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan pemberdayaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pemberdayaan. Kegagalan berbagai program pemberdayaan adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan tidak melibatkan masyarakat. Hal inilah yang terjadi pada program Gerbang Dayaku. Padahal jika melihat jumlah dana dan jumlah kegiatan yang dilakukan jauh lebih banyak daripada program comdev perusahaan, apalagi program-program LSM.

Proses pemberdayaan pada program Gerbang Dayaku lebih mengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya peranan daerah pada arus utama kehidupan bermasyarakat, sementara keterlibatan masyarakat hanya dalam tataran wacana yang tertuang dalam program, namun dalam implementasi hanya menjadi sekedar pelengkap proses pemberdayaan. Akibat dari mekanisme pemberdayaan yang kurang aspiratif dan tidak partisipatif ini, membuat proses dan hasil pemberdayaan Gerbang Dayaku menjadi parsial dan tidak berkelanjutan. Intinya, sebagian besar kegiatan pemberdayaan merupakan program dari atas (*top down*), sangat berorientasi proyek, dan lebih menonjolkan ego sektoral.

Wacana pemberdayaan yang partisipatif di Kabupaten Kutai Kartanegara sesungguhnya telah dimulai sejak Tahun 2000, yaitu sejak Program Gerbang Dayaku diluncurkan oleh Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara saat itu. Konsep utamanya adalah pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Akan tetapi, partisipasi masyarakat ini, menurut masyarakat target, tidak lebih hanya sebagai jargon pemberdayaan di mana partisipasi diartikan pada bagaimana upaya mendukung program pemerintah dan upaya-upaya yang pada awal dan konsep pelaksanaannya berasal dari pemerintah. Berbagai keputusan umumnya sudah diambil dari atas, dan sampai ke masyarakat dalam bentuk sosialisasi yang tidak bisa ditolak.

Sangat menarik untuk mencermati bahwa partisipasi masyarakat untuk program-program pendampingan yang dilakukan oleh LSM adalah cukup tinggi. Bahkan berdasarkan ciri-ciri dari bentuk partisipasi, program LSM tergolong ke dalam tingkat partisipasi *co-learning*, yang menempatkan masyarakat sebagai partner atau mitra yang sejajar dengan *change agent*. Sementara itu, partner terbesar LSM adalah masyarakat “ikan”, karena LSM memang fokus pada program pendampingan untuk kelompok masyarakat ini. Lalu, bagaimana dengan dugaan awal (terutama oleh *change agent*) yang menyatakan masyarakat “ikan” adalah masyarakat yang tingkat partisipasinya adalah lemah?. Makna yang tersirat dari fakta ini adalah tidak selalu masyarakat “ikan” partisipasinya lemah. Tapi, tingkat partisipasi sangat tergantung dari program dan pendekatan yang dibuat dan digunakan oleh *change agent*.

Masyarakat ikan mayoritas adalah masyarakat pendatang, yang berani mengambil risiko meninggalkan kampung halaman untuk berjuang dan berusaha di negeri orang. Keberanian mengambil risiko ini merangsang seseorang untuk bisa berusaha lebih keras, namun karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan, maka masyarakat ikan cenderung hanya akan menerima program yang diketahuinya, yang sesuai dengan kebutuhannya. Di sisi lain, masyarakat ikan cenderung tertutup, sehingga hanya dengan cara dan pendekatan tertentu, mereka

dapat membuka diri dengan orang lain. Ketika LSM menyentuh mereka dengan pendekatan hati dan kekeluargaan, karena sudah saling mengenal satu sama lain, di saat itulah mereka bisa membuka diri. Hasilnya sangat mengejutkan, di mana partisipasi masyarakat ikan terhadap program LSM jauh di atas program comdev dan Gerbang Dayaku. Fakta ini memberikan pemahaman bahwa tingkat partisipasi masyarakat, sangat tergantung dari program yang ditawarkan dan pendekatan yang digunakan oleh *change agent*. Di sisi lain, vonis bahwa masyarakat ikan adalah masyarakat yang rendah partisipasi dan motivasinya, adalah tidak beralasan.

Hasil ini kembali memperkuat pendapat Overwell yang menyatakan pentingnya pengetahuan tentang *target group*. Overweel menyebutkan (2008): “Jika anda memiliki suatu produk untuk dijual, anda harus menentukan siapa *target group* anda dan meyakinkan orang-orang tersebut bahwa produk yang anda jual akan membuat kehidupan mereka lebih baik”. Lebih jauh Overweel (2008) menyebutkan bahwa, “LSM pembangunan” (baca: *change agent*, peneliti) juga “menjual” program pembangunan mereka dan mereka juga harus meyakinkan *target group* bahwa program tersebut bagus untuk mereka. Mungkin analogi yang dijelaskan disini terdengar agak sarkastik, tapi begitulah kenyataannya”.

Masyarakat “ikan” yang menurut pemerintah dan perusahaan sangat sulit dimotivasi, dapat diyakinkan LSM untuk berpartisipasi dalam setiap program pendampingannya. Kunci keberhasilan LSM meyakinkan masyarakat, nampaknya berada pada perekrutan pemuda-pemuda setempat untuk setiap program pendampingan mereka. Pemuda-pemuda dijadikan sebagai “*public service*” atau “*salesman*” untuk menjual produk pemberdayaan di lingkungan mereka sendiri. Di samping itu, produk program pemberdayaan LSM adalah produk yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Paling tidak para “*salesman*” pemberdayaan ini, mampu meyakinkan masyarakat bahwa masyarakat memang membutuhkan produk mereka. Nampaknya, pendapat Overweel ini bukan hanya konsep semata, tetapi

memang terbukti berjalan di Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara.

E. Implikasi Hasil Penelitian

1. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari penulisan ini adalah perkuatan teori institusional ekonomi baru (*New Institutional Economics/NIE*), yang menekankan bahwa faktor kelembagaan (institusi) adalah sangat penting sebagai usaha untuk mengintegrasikan kembali faktor nilai (*value*) dalam setiap pengambilan keputusan. Faktor kelembagaan ini dibangun sebagai usaha meng-eleminir dampak dipakainya asumsi rasionalitas instrumental (*instrumental rationality*) oleh teori ekonomi pada umumnya. Asumsi rasionalitas instrumental inilah yang membuat ekonomi menjadi ‘bebas nilai’. Akibatnya ekonomi menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri, terlepas dari disiplin ilmu lainnya yang seharusnya berkontribusi dalam setiap pengambilan keputusan, terutama untuk berbagai kebijakan publik seperti pemberdayaan masyarakat. Padahal menurut Johnson (1962: 2) bahwa jika penulisan termasuk ke dalam ranah penulisan *problem solving* dan *subject matter*, maka sangat penting untuk menyisipkan muatan disiplin ilmu sosial lainnya

Penggambaran atau pemetaan makna pemberdayaan dari perspektif pemerintah, perusahaan, LSM dan masyarakat tentang pemberdayaan adalah merupakan bagian dari ekonomi kelembagaan. Saat peta pemahaman pemberdayaan diungkapkan dari berbagai perspektif pelakunya, maka saat itulah telah dibangun sebuah teori institusional ekonomi. Merujuk pada pendapat Williamson (2000) bahwa *New Institutional Economics* beroperasi pada dua level, yakni *institutional environment (macro level)* dan *institutional arrangement (micro level)*, maka implikasi teoritis penulisan ini berada pada ranah *institutional arrangement*. Gambaran atau peta pemikiran para pemangku kepentingan pemberdayaan inilah yang menurut penulis sebuah *institutional arrangement*. Jika *institutional arrangement* yang

berlaku antar pemangku kepentingan pemberdayaan memiliki mutu yang tinggi, maka pemberdayaan memiliki probabilitas yang besar untuk berhasil. Keberhasilan ini dapat terjadi karena proses “pembumihian” teori ekonomi dengan cara memasukkan unsur nilai berhasil dilakukan.

Beberapa pemaparan sebelumnya, menemukan beberapa bukti bermasalahnya penerapan mekanisme pasar yang menjadi ajaran baku ekonomi konvensional. Pertama, alokasi sumberdaya yang tidak mengikuti mekanisme pasar. Kasus yang ditemukan dalam penulisan ini adalah saat para pekerja tambak pada kelompok masyarakat “ikan”, enggan untuk membuka lahan baru, padahal sumberdaya lahan masih tersedia luas, dan pemodal juga bersedia meminjamkan modalnya. Tapi, ada nilai yang berlaku dimasyarakat yang mengharuskan si pekerja tambak untuk meminta pertimbangan kepada pemberi kerja, sebagai bentuk kompensasi atas kesediaan pemberi kerja untuk memberikan pekerjaan kepadanya. Jika pemberi kerja tidak memberikan izin, maka pekerja tambak tidak akan berani untuk membuka lahan baru. Kasus lainnya adalah tentang efisiensi alokasi sumberdaya. Pemerintah telah menyiapkan SPBN (Stasiun Penyuplai Bahan Bakar untuk Nelayan) dengan harga solar bersubsidi. Namun para nelayan lebih senang membeli solar pada kapal-kapal besar yang menjual kelebihan solarnya kepada nelayan dengan harga yang sedikit lebih tinggi dibanding harga solar bersubsidi di SPBN.

Kedua adalah tentang biaya transaksi (*transaction cost*) yang bagi ekonomi neoklasik adalah tidak ada (*nir*), namun faktanya saat pengucuran program terutama pada program pemberdayaan pemerintah, biaya transaksi justru sangat menentukan apakah program itu diberikan atau tidak. Pemerintah di sisi lain juga menanggung biaya transaksi yang muncul dari *pressure* politik dari anggota legislatif, sementara masyarakat menanggung biaya transaksi atas kompensasi disetujuinya program pemberdayaan tertentu untuk mereka. Akibatnya kondisi inefisiensi selalu terjadi. Ketiga adalah aspek eksternalitas, terutama pada program-program pemberdayaan yang dilakukan perusahaan. Perusahaan berada pada kondisi dimana biaya sosial

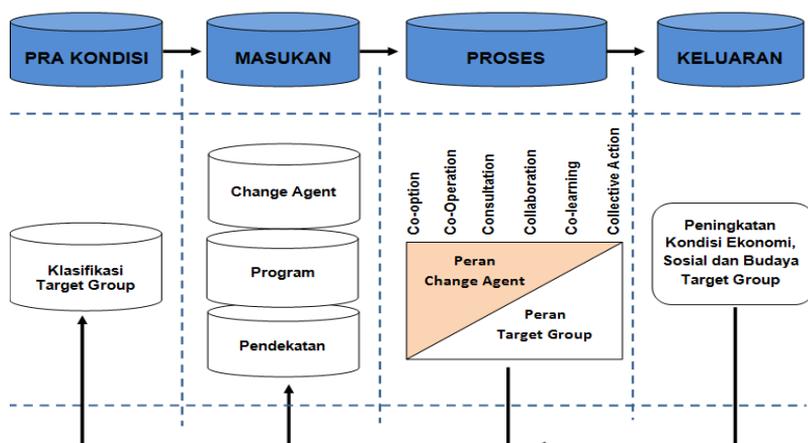
lebih tinggi dibanding benefit sosial yang diperoleh (eksternalitas negatif). Biaya sosial yang ditanggung perusahaan adalah tuntutan-tuntutan masyarakat atas kerusakan lahan tambak yang ditengarai disebabkan oleh beroperasinya eksplorasi migas. Tuntutan masyarakat ini seiring berjalannya waktu semakin besar dan semakin tinggi frekuensinya. Artinya eksternalitas negatif juga akan terus terjadi. Keempat adalah aspek informasi. Kesadaran akan pentingnya kelembagaan ekonomi dalam penulisan ini adalah adanya bukti bahwa informasi yang diperlukan oleh *change agent* dalam pengambilan keputusan sering salah dan tidak sampai. Banyak kasus untuk aspek ini. Kasus pemberian bak sampah kepada masyarakat, padahal yang diperlukan masyarakat adalah penyuluhan dan kesadaran hidup bersih. Lalu kasus pemberian mesin pembuat kerupuk, padahal yang diperlukan adalah bagaimana memasarkan produk yang sudah dibuat.

2. Implikasi Praktis

Implikasi penelitian ini, praktisnya menggiring penulis kepada model proses pemberdayaan yang diduga kuat terbaik telah diterapkan pada Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara. Prosesnya adalah tingkat keberhasilan pemberdayaan sangat tergantung dari tingkat partisipasi masyarakat target. Sementara tingkat partisipasi masyarakat target sangat tergantung dari program dan pendekatan pemberdayaan yang dilakukan pelaku pemberdayaan (*change agent*). Lalu, program dan pendekatan pemberdayaan sangat tergantung dari klasifikasi masyarakat target (prakondisi pemberdayaan).

Gambar 6.10 mengilustrasikan implikasi praktis dalam penulisan ini, yang sebenarnya adalah modifikasi dari Gambar Kerangka Penulisan (Bab III), setelah penulisan ini selesai dilaksanakan. Tingkat keberhasilan pemberdayaan diukur dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan indikator ekonomi, sosial dan budaya. Ketiga indikator ini sama pentingnya untuk menunjukkan tingkat keberhasilan program pemberdayaan. Tingkat keberhasilan pemberdayaan sangat tergantung dari

tingkat partisipasi masyarakat target. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin kuat kecenderungan keberhasilan program pemberdayaan. Ukuran tingkat partisipasi masyarakat ditunjukkan oleh peran masyarakat dalam setiap proses pemberdayaan, yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Semakin besar peran masyarakat target, dan semakin kecil peran pelaku pemberdayaan (*change agent*), maka semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat.



Sumber: Diolah Penulis, 2009.

Gambar 6.10 Implikasi Praktis Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara

Bagaimana membuat masyarakat target berperan lebih banyak dibanding pelaku pemberdayaan? Kata kuncinya ada pada program dan pendekatan pemberdayaan. Identifikasi di Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara menyebutkan bahwa program pemberdayaan yang dilakukan oleh *change agent* adalah pendampingan, penyuluhan, dan pemberian bantuan. Secara ekstrim dapat dikatakan bahwa program pemberdayaan terdiri dari dua, yaitu program fisik (pemberian bantuan dan pembangunan infrastruktur) dan non fisik (penyuluhan dan pendampingan). Pendekatan pemberdayaan, di sisi lain terdiri dari dua, yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro.

Pemberdayaan fisik efektif dan efisien dilakukan dengan pendekatan makro, sementara pemberdayaan non fisik efektif dan efisien dengan pendekatan mikro.

Bagaimana menetapkan sasaran pemberdayaan fisik dengan pendekatan makro, dan pemberdayaan non fisik dengan pendekatan mikro, maka pertimbangannya adalah mempetakan (*mapping*) prakondisi masyarakat target melalui pengklasifikasian masyarakat *target group*. Masyarakat target dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang sama karakteristiknya. Biasanya pada masyarakat di wilayah pesisir terdapat dua kelompok ekstrim, yaitu kelompok masyarakat yang tinggal di laut (ikan dan akar), dengan kelompok masyarakat yang tinggal di darat (pancing dan ranting). Kedua kelompok masyarakat ini sebenarnya memiliki karakter yang sama, namun terlihat berbeda. Perbedaan karakter menjadi terlihat berbeda karena program dan pendekatan yang biasanya dilakukan oleh Gerbang Dayaku dan comdev diperuntukkan untuk masyarakat yang tinggal di darat. Padahal jika mengacu kepada program pendampingan LSM, masyarakat ikan memiliki partisipasi yang tinggi. Artinya, partisipasi masyarakat memang sangat tergantung dari program dan pendekatan yang digunakan. Program pemberdayaan non fisik dengan pendekatan mikro, lebih tepat untuk kelompok masyarakat "ikan". Sebaliknya program pemberdayaan fisik dengan pendekatan makro lebih tepat sasaran pada kelompok masyarakat "pancing".

BELAJAR DARI PENGALAMAN

Mempelajari kehidupan manusia di saat tertentu jelas lebih bermanfaat, karena lebih realistis, ketimbang mempelajarinya dengan membayangkan berada dalam keadaan diam (Toybee. 1963)

Change agent memiliki sudut pandang yang berbeda (meski ada sisi-sisi yang sama) tentang pemberdayaan masyarakat di Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara. Perbedaan sudut pandang terjadi pada setiap aspek atau obyek yang diteliti dalam penulisan ini. Perbedaan pertama terletak pada makna dan tujuan pemberdayaan masyarakat. Makna pemberdayaan menurut pemerintah adalah usaha mendorong masyarakat untuk bisa hidup mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan ukuran-ukuran fisik dan non fisik dalam kehidupan masyarakat. Makna pemberdayaan menurut perusahaan adalah usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ingin sejahtera, dengan ukuran mutlak dan relatif, sehingga terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan perusahaan. Sedangkan makna pemberdayaan menurut LSM adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan riilnya, dengan usaha dan kemampuan masyarakat sendiri, melalui indikator ekonomi, sosial dan budaya.

Perbedaan sudut pandang ini mengakibatkan implementasi pemberdayaan masyarakat ketiga *change agent* tidak bersinergi dengan baik, meskipun setiap tahun *change agent* terlibat langsung dalam Musrenbang. Akibat kedua ini, tercermin dari program dan pendekatan pemberdayaan yang dilakukan *change agent* menjadi berbeda. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah melalui “Gerbang Dayaku” lebih terkonsentrasi pada program-program fisik dengan pendekatan

makro. Perusahaan melalui Comdev melakukan kombinasi program fisik dan non fisik dengan pendekatan mezo (makro dan mikro). Di sisi lain, LSM melakukan kegiatan pendampingan dan penyuluhan (non fisik) dengan pendekatan mikro.

Perbedaan sudut pandang tentang pemberdayaan masyarakat bukan hanya terjadi antara ketiga *change Agent*, tetapi juga antara *change agent* dan *target group*. Bahkan perbedaan sudut pandang tentang pemberdayaan masyarakat juga terjadi di antara sesama *target group*. *Target group* “pancing” menyebutkan makna pemberdayaan adalah bantuan secara adil dan merata yang dapat bermanfaat dan dibarengi dengan adanya peluang partisipasi masyarakat. Motivasi utamanya adalah ingin hidup lebih sejahtera. Makna pemberdayaan menurut *target group* “ikan” adalah pemberian peluang untuk hidup secara mandiri tanpa tergantung pada orang lain. Motivasi utamanya adalah ingin mengubah nasib dan ketergantungannya dengan orang lain.

Sudut pandang yang berbeda antara *change agent* dengan *target group* mengakibatkan tingkat partisipasi *target group* terhadap program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan *change agent* juga berbeda. Partisipasi masyarakat pada program “Gerbang Dayaku” yang dilakukan pemerintah berada pada tingkat konsultasi (*consultation*). Tingkat partisipasi masyarakat pada program Comdev yang dilakukan perusahaan berada pada tingkat kolaborasi (*collaboration*). Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap program pendampingan dan penyuluhan yang dilakukan LSM telah berada pada posisi *co-learning*. Artinya, LSM adalah *change agent* yang memperoleh partisipasi paling tinggi dari *target group*. Urutan berikutnya adalah perusahaan, dan yang terakhir adalah pemerintah. Kondisi ini lebih disebabkan karena LSM dapat menetapkan program dan pendekatan yang tepat untuk setiap kelompok *target group*. Sehingga tidak aneh jika di kelompok *target group* “ikan” pun, LSM memperoleh partisipasi yang tinggi. Berbeda dengan pemerintah yang terlalu fokus pada program fisik dengan pendekatan makronya, sehingga

hanya memperoleh partisipasi yang rendah dibanding dua *change agent* lainnya.

Tingkat partisipasi *target group* yang berbeda, mencerminkan penerimaan *target group* terhadap program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh *change agent*. Semakin tinggi partisipasi *target group* maka semakin tinggi pula tingkat penerimaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan *change agent*. Tingkat penerimaan yang tinggi dari *target group* inilah yang membuat kemungkinan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat menjadi lebih besar. Siklus antara makna pemberdayaan menurut *target group* yang mencerminkan kluster masyarakat, program pemberdayaan, pendekatan pemberdayaan, dan partisipasi *target group* akan terus berlangsung. Tujuannya adalah untuk mencapai situasi di mana tingkat partisipasi *target group* berada pada tingkat tertinggi, yaitu *collective action* dapat dijalankan. Artinya, pengungkapan makna pemberdayaan (*mind mapping*) baik menurut *change agent* maupun *target group* untuk menetapkan program dan pendekatan yang tepat, harus terus dilakukan dan tidak akan pernah berakhir.

Mengacu pada uraian di atas, maka beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai pelajaran, yang disesuaikan dengan kepentingan *change agent*, dan pihak lainnya, yaitu:

- 1) Pemerintah melalui Program Gerbang Dayaku
 - a) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah tokoh utama di antara *change agent*, karena secara *de jure* memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan di wilayahnya. Program Gerbang Dayaku, yang secara akademik sangat bermutu dapat dijadikan *blueprint* pembangunan di daerah. Namun, perlu membuka peluang kepada perusahaan, LSM dan *stakeholder* lainnya untuk terintegrasi dalam program pemberdayaan. Artinya, perlu kesepakatan peran masing-masing *change agent*, sehingga pemberdayaan yang dilakukan oleh *change agent* dapat berjalan lebih terkoordinasi dan terintegrasi.

- b) Konsep Gerbang Dayaku selayaknya diimplementasikan secara lebih konsisten, terutama dalam penentuan program dan pendekatan pemberdayaan. Program selayaknya lebih merata pada seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan klasifikasi atau entitas masyarakatnya. Sementara pendekatan pemberdayaan yang terlalu “berat” ke pendekatan makro, perlu direformasi ke arah pendekatan mikro sebagai tahap awal memprakondisikan masyarakat target yang paling tidak siap kondisinya (masyarakat golongan “ikan”).
 - c) Pergeseran atau optimalisasi bauran pendekatan mikro dengan pendekatan makro, dapat dilakukan secara gradual dengan mencermati umpan balik (*feedback*) dari evaluasi program pemberdayaan, yang bukan hanya menyentuh aspek administrasi, tetapi juga menyentuh aspek perubahan perilaku masyarakat. Perubahan perilaku masyarakat menuju kemandirian sejatinya adalah landasan utama dalam pemberdayaan.
- 2) Perusahaan melalui Program *Community of Development* (Comdev)
- a) Meski *target group* Comdev adalah masyarakat “dahan/ranting atau pancing”, namun tidak selayaknya perusahaan mengabaikan kelompok “ikan atau akar”. Reorientasi *target group* Comdev perlu dilakukan mengingat sebagian besar masyarakat target yang berada pada *buffer zone* adalah masyarakat golongan “ikan atau akar”.
 - b) Konsekuensi dari reorientasi *target group* comdev yang juga menyentuh kelompok masyarakat “ikan/akar” adalah penyesuaian jenis dan bentuk program, yang juga harus menyentuh program pendampingan dan penyuluhan yang lebih intensif.
- 3) Lembaga Swadaya Masyarakat melalui Program Pendampingan dan Penyuluhan.
- Meski dipandang berhasil, program pendampingan LSM selayaknya beranjak dari program pendampingan secara

insidental dan parsial menjadi program pendampingan yang berkelanjutan. Dua manfaat yang dapat diperoleh adalah; pertama hasil pemberdayaan dapat lebih efektif dan cepat. Kedua, peluang memperoleh dana dari lembaga-lembaga donor luar negeri semisal UNDP menjadi lebih besar.

4) Peluang penelitian lanjutan.

Perlu dilakukan penulisan lanjutan dengan obyek dan subyek penulisan yang lebih mikro. Subyek penulisan dapat lebih dipersempit pada masyarakat “ikan” dan “pancing”, atau kelompok masyarakat lainnya. Obyek penulisan, sementara itu dapat dipersempit hanya untuk mengamati salah satu di antara proses pemberdayaan, misalnya; perencanaan program, penentuan pendekatan, sampai dengan evaluasi pemberdayaan. Pengamatan terhadap kelompok obyek dan subyek yang lebih kecil, tentu akan lebih fokus, sehingga pembahasan dan pengungkapan makna akan lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adamson, Dave. 2010. *Community empowerment; Identifying the barriers to "purposeful" citizen participation*. The International Journal of Sociology and Social Policy. Patrinton: 2010. Vol. 30, Edisi 3.
- Archer, Margareth S., 1985. *Structuration versus Morphogenesis*. In S.N. Eisenstad and H. J. Helle (eds). Macro Sociology Theory. Volume I. Sage. London.
- , 1986. *Talking Time to Link Structure and Agency*. Ixth Word Congress of Sociology (mimeo). New Delhi.
- , 1988. *Culture and Agency*. Cambridge: Cambridge University Press.
- , 1989. *The Morphogenesis of Social Agency*. SCASS (mimeo). Uppsala.
- Bogdan, Robert dan Biklen, Sari Knop. 1982. *Qualitative research for education: An introduction to theory and methods*. Allyn and Bacon. Boston.
- Brown, Donald. 1995. "Poverty-Growth Dichotomy". Uner Kirdar dan Leonard Silk. *People: From Impoverishment to Empowerment*. New York University Press. New York.
- Etzioni, A. 1992. *Dimensi Moral: Menuju Ilmu Ekonomi Baru*, Penerbit: PT Rosdakarya. Bandung.
- Hikmat, H, 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora: Bandung.
- Ife, J.W, 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*: Longman. Australia.
- Janssens, Wendy. 2010. *Women's Empowerment and the Creation of Social Capital in Indian Villages..* World Development. Oxford: Jul 2010. Vol. 38, Edisi 7

- Johnson, Glen Leroy. 1986. *Research Methodology for economics*. Macmillan Publishing Company. New York.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Power and Empowerment: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Khairuddin, 2000. *Pembangunan Masyarakat., Tinjauan Aspek: Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan*. Liberty, Yogyakarta.
- Kotler, Philip. 2005. *Manajemen pemasaran*, (Edisi kesebelas). PT. Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Kotler, P., Bowen, J., & Makens, J, 2002. *Pemasaran perhotelan dan pariwisata*, (Edisi Kedua). PT. Prenhallindo. Jakarta.
- Llambi, Luís D, Dkk. 2005. *Participatory Planning for Biodiversity Conservation in the High Tropical Andes: Are Farmers Interested?* Mountain Research and Development. Boulder: Vol. 25, Edisi 3;
- May, Candace K. 2008. *Achieving sustainability in US fisheries: community engagement in co-management*. Sustainable Development. Chichester: Nov/Dec 2008. Vol. 16, Edisi 6.
- Mochtar, Ari. 2009. *“Revolusi Pengetahuan, Kemiskinan dan Politik*. Website Ahmad Wiryawan. <http://www.ahmadwiryawan.com/>
- Mochtar, Ari. 2009. *“Revolusi Pengetahuan, Kemiskinan, dan Politik*. Website Ahmad Wiryawan. <http://ahmadwiryawan.com>.
- Moleong. J Lexy. 1993. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya- Bandung.
- Myrdall, Gunar. 1969. *Objectivity in Social Research*. Gerald Duckworth.
- Nasution. 1992. *Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif*. Tarsito, Bandung.

- North, Douglas C. 2005. *Institutions, Institutional Change and Economics Performance*. <http://nobelprize.org/economics/laureates/1993/north-lecture.html>, 27 April 2005
- Overweel, Jeroen A. 2008. *The Marind in A Changing Environment*. YAPSEL. Irian Jaya. Indonesia.
- Paul, S. 1987. *Community Partisipation in development Project. The World Bank Experience*. The World Bank. Washington DC.
- Payne, M. 1997. *Social Work and Community Care*. McMillan. London.
- Poli, W.I.M, 2005. *Bahan Kuliah Filsafat Ilmu*. (Tidak dipublikasikan). Pascasarjana (S3) Universitas Hasanuddin. Makassar.
- , 2006. *Suara Hati yang Memberdayakan*, Pustaka Refleksi. Makassar
- , 2007. *Modal Sosial Pembangunan*, Hasanuddin University Press. Makassar.
- , 2007. *Yawa Datum di Tanah Papua*, Identitas Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Poli, W.I.M, dkk. 2008. *Derita, Karya, dan Harapan Perempuan Papua*. Identitas Universitas Hasanuddin. Makassar
- Prijono, O.S. dan Pranarka, A.M.W., 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Penerbit Centre for Strategic and International Studies, Jakarta.
- Pranaka dan Vidhyandika. 1996. *Pemberdayaan (Empowerment)*. Jakarta: Centre of Strategic and International Studies (CSIS).
- Rappaport. 1987. "Terms of Empowerment: Toward a theory for Community Psychology". American Journal of Community Psychology. Vol. 15. No.2: 15-16
- Robinson, J.R. 1994. *Community Development in Perspective*. Iowa

State University Press. Ames.

Simon, Barbara Levy. 1990. *Rethinking Empowerment*. Journal of Progressive Human Services, Volume 1, Issue 1 August 1990 , pages 27 – 39. <http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a90483089>

Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gaya Media. Yogyakarta.

Suprijatna, T. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Rineka Cipta: Jakarta.

Syahyuti, 2006. *30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*. Bina Rena Pariwisata. Jakarta.

Szytompka, Piotr. 1993. *The Sociology of Social Change*. Dialihbahasakan oleh Alimandan. Prenada. Jakarta.

Ullah, A.K.M. Ahsan, Jayant K. Routray. 2007. *Rural Poverty Alleviation Through NGO Interventions In Bangladesh: How Far Is The Achievement?*. International Journal of Social Economics, Vol. 34

Williamson, O.E. 2000. *The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead*. Journal of Economic Literature. Vol. 38, pp. 595-613.

Yustika, Ahmad Erani. 2006. *New Institutional Economics Atau Ekonomi Kelembagaan (Definisi, Teori Dan Aplikasi)*. Jurnal Ilmiah FIA-UB. <http://publik.ub.ac.id/>



Irwan Gani, Lahir 20 September 1970 di Kuala Kapuas Kalimantan Tengah. Menamatkan pendidikan dasar dan menengah di kota yang sama dengan kota kelahirannya (1982-1988). Pendidikan sarjana dijalani di Kota Banjarmasin (1988-1992), untuk selanjutnya melanjutkan ke jenjang magister (200-2002) dan Doktor (2005-2010) di Kota Makassar.

Setelah menamatkan pendidikan sarjana, menjadi dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Achmad Yani Banjarmasin (1993-2000). Setelah menamatkan pendidikan Magister, dipercaya menjadi salah satu direktur pada Perusda AUJ Kota Bontang (2003-2005). Selanjutnya diangkat menjadi dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda, sampai sekarang.

Penulis aktif meneliti dengan fokus kajian ilmu ekonomi, terutama kajian-kajian tentang pemberdayaan masyarakat dan kemiskinan. Berbekal pengalaman itu, penulis dipercaya menjadi Direktur Research di *The Jawa Post Institute of Pro Autonomy Area Kalimantan Timur* sejak Tahun 2009 sampai dengan sekarang.

Selain meneliti, penulis juga aktif dalam berbagai seminar baik sebagai pembicara maupun peserta dan menulis beberapa opini di Kaltim Post. Buku yang pernah ditulis, adalah; *Alat Analisis Data untuk Penelitian* (Kallamedia Pustaka, Makassar, 2003), *Pandangan Stakeholder Pemberdayaan Masyarakat* (Red Carpet Studio, Bekasi, 2011).

